



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR RI
DENGAN BPJS KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023 – 2024
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 2 Juli 2024
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Acara : 1. Evaluasi terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh terdampak PHK di berbagai daerah.
2. Penyelesaian atas kasus-kasus klaim peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Evaluasi terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta capaian target kepesertaan Pekerja Migran Indonesia
- Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. 14.07 WIB
Ketua Rapat : Emanuel Melkiades Laka Lena
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
24 dari 50 orang Anggota dengan rincian:
- I. PIMPINAN KOMISI IX DPR RI:**
1. Charles Honoris/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/F-PDI Perjuangan
 2. Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/F-Golkar
 3. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A./Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/F-PKB
- II. ANGGOTA:**
- FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**
3 orang Anggota dari 9 Anggota:
1. Dra. Elva Hartati, SIP., MM
 2. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP., M.Kep
 3. Rahmad Handoyo, S.PI., M.M

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-GOLKAR)

2 orang Anggota dari 6 Anggota:

1. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
2. M. Yahya Zaini, S.H.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)

3 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR
2. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M.
3. Dra. Hj. Ruskati Ali Baal

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Irma Suryani, S.E., M.M
2. Nurhadi, S.Pd
3. Hj. Sitti Maryam, S.Sos., M.Si.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. H. Handayani, S.K.M., M.P.H.
2. Hj. Nur Nadlifah, S.Ag., M.M
3. Dr. Hj. Arzeti Bilbina, M.A.P.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-DEMOKRAT)

1 orang Anggota dari 5 Anggota:

- Drs. H. Zulfikar Achmad

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)

1 orang Anggota dari 4 Anggota:

- H. Ansory Siregar, Lc.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

3 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., M.Hum., M.A
2. Dian Istiqomah, S.Kep
3. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)**

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Hj. Nurhayati
2. Sy. Anas Thahir

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan
2. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Baik Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai.

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Selasa, 2 Juli 2024 bisa kita mulai.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Shalom,
Salve,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam sehat,
Salam kebajikan bagi kita semua.*

**Yang terhormat saudara Dewas, Ketua, dan jajaran pengurus Dewas pengawas BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran,
Yang terhormat saudara Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran,
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, serta
Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa memulai rapat dan sebelum memulai rapat alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing.

Berdoa dipersilakan.

(RAPAT: BERDOA)

Berdoa selesai.

Pada saat ini rapat kita masih kurang dari kuota dari ketentuan. Untuk itu kami akan skors rapat kira-kira 5 menit kita semua tetap di tempat. Setelah 5 menit kalau memang andai kata juga tidak memenuhi kuorum, kita sudah tetap bisa memulai untuk melanjutkan rapat seperti sesuai aturan yang ada. Dengan begitu rapat saya skors 5 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 10.38 WIB)

Baik Bapak Ibu sekalian. Skors sementara saya cabut, kita bisa mulai. Baik, skors saya cabut ya.

(SKORS DICABUT PUKUL 10.42 WIB)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Ayat (1), setelah kita skors kita bisa mulai rapat pada hari ini, rapat dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA KEMBALI PUKUL 10.42 WIB)

Mengenai waktu rapat, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami jam 2 siang ada rapat lagi dengan Pak Menkes dan jajaran, kita akan upayakan kita efektif, efisien dalam materi hari ini, rapat kita buka jam 10.50 sampai jam 12.30 jika memang perlu nanti kita tambah dikit.

(RAPAT: SETUJU)

Adapun rapat pada hari ini agendanya adalah:

1. Evaluasi terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh terdampak PHK di berbagai daerah.
2. Penyelesaian atas kasus-kasus klaim peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Evaluasi terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta capaian target kepesertaan Pekerja Migran Indonesia.

Untuk itu kami persilakan yang pertama dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan paparan, nanti setelah dari Direktur Utama baru kita ke Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Kepada Pak Anggoro kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX, Pak Melki, beserta Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX yang kami hormati.

Bapak dan Ibu, kami direksi hadir lengkap tujuh orang, Pak Jay Direktur Kepesertaan, Bu Oci Direktur Pelayanan, Pak Asep Direktur Keuangan, Pak Edwin Direktur Investasi, di belakang saya ada Pak Pram Direktur IT dan Perencanaan dan Pak Ari Direktur SDM dan umum.

Pagi ini sesuai agenda kami akan menyampaikan tiga hal yang tertera dalam undangan, silakan. Maaf terlewat,



Yang saya hormati Pak Zuhri Ketua Dewas dan Anggota Dewas yang hadir,

Silakan *slide* pertama. Oh baik, lanjut.

Baik sesuai undangan dari tiga agenda yang akan kami sampaikan, evaluasi terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan buruh terdampak PHK di berbagai daerah, yang kedua penyelesaian atas kasus-kasus klaim program jaminan sosial ketenagakerjaan dan yang ketiga evaluasi terhadap perlindungan PMI dan juga pencapaiannya.

Kami mulai dari yang pertama. Kami melihat, mengikuti berita-berita PHK di industri garmen, tekstil, alas kaki dan *e-commerce* Indonesia yang memang kami melihat dalam waktu belakangan ini cukup ramai diberitakan, paling tidak yang kami *highlight*, ada beberapa ada 13.800 orang di 10 perusahaan ter-PHK untuk beberapa perusahaan di mediasi NBC. Memang banyak hal terkait dengan efisiensi yang kita ikuti, kami juga nanti kita sampaikan kami juga melakukan pendalaman ke beberapa perusahaan besar di masing-masing wilayah untuk mengetahui apa permasalahannya.

Dari asosiasi produsen serat dan benang filamen juga mencatat ada 3 perusahaan tekstil yang gulung tikar dan 10 lainnya terancam tutup. Lalu hampir 250 orang menjadi korban PHK di Sepatu Bata yang baru-baru kita dengar dan juga di *e-commerce*. Kami menambahkan juga *e-commerce* di sini karena kita juga melihat, mengikuti bahwa Tokopedia akan mem-PHK 450 karyawannya. Dari sini kami coba melihat data-data yang ada di internal kami seperti apa data dan trend-nya, silakan *slide* berikutnya.

Kami menyoroti paling tidak beberapa sektor saja yang memang ramai yaitu, garmen dan pakaian jadi. Kalau garmen dan pakaian jadi di *slide* ini di grafik kiri atas kita melihat bahwa sejak tahun 2023 Januari memang trennya menurun. Kita melihat penurunannya kurang lebih 4,2% jadi 24.000 orang yang tidak menjadi peserta lagi di industri ini.

Saat ini posisi terakhir adalah 559.869. Terlihat agak naik sedikit di bulan Mei tahun lalu dan juga April tahun ini, itu karena ada di lebaran, biasanya *demand*-nya tinggi di lebaran, perusahaan-perusahaan merekrut pekerja karena memenuhi pesanan, setelah itu kembali lagi ke posisi normal. Sehingga kelihatan di grafik kiri atas ada yang naik sedikit turun lagi di tahun ini juga begitu menjelang lebaran naik sedikit dan turun lagi. Ini adalah tren untuk garmen dan pakaian jadi.

Pada intinya memang tren ini grafik ini menunjukkan memang terjadi penurunan di kepesertaan kami di sektor industri dan pakaian jadi. Begitu juga industri tekstil kalau kita lihat penurunannya sejak Januari 2023 sampai dengan bulan Mei ini itu turunnya 6% atau turun 21.000 TK aktif sampai dengan bulan Mei 2024.

Sektor kulit barang dari kulit dan alas kaki sedikit lebih baik karena di 4 bulan terakhir ini kelihatannya grafiknya sudah mulai naik. Kalau dari Januari 2023 sampai dengan Desember itu masih turun terus 6%, di 4 bulan terakhir ini mulai meningkat kurang lebih 3%. Ini sedikit ada kabar baik di alas kaki dan kulit.

Berikutnya, bagaimana sebaran provinsinya. Untuk industri garmen, tekstil dan alas kaki, total perusahaan yang ada di data kami adalah 6.962, ada di-di *slide* ini di kanan bawah dengan total peserta adalah 1,5 juta. 82%-nya itu ada di Jawa yang di kotak warna merah itu 82%-nya yaitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jogja itu adalah 82%. Jadi dari 6.900 ada 5.700 yang ada di Jawa, dari 1,5 juta, 1,4 jutanya ada di Jawa. Inilah konsentrasi dari sektor industri garmen tekstil dan alas kaki sebaran demikian.

Berikutnya, nah ini beberapa hal yang kami lakukan. Melihat tren tersebut kami terus memastikan hak-hak pekerja terkait dengan PHK. Tentu saja kita lakukan koordinasi, komunikasi dengan asosiasi kementerian dan perusahaan. Kami berbicara langsung dengan mereka untuk memastikan sebenarnya dari berita-berita yang beredar itu sebenarnya berapa besar yang sebenarnya memang tutup, karena kadang-kadang berita-berita akan kita perlu klarifikasi juga.

Paling tidak dari komunikasi kami dengan asosiasi produsen serat dan benang filamen itu kita dapatkan data 31 perusahaan terlapor tutup, 21 perusahaan melakukan PHK sebagian. Dan juga kami juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kemnaker, paling tidak kita memastikan kepada perusahaan sosialisasi manfaat dari kepesertaan kita. Jangan sampai mereka walaupun mereka ter-PHK mereka tidak tau bahwa mereka punya manfaat JHT, mereka punya manfaat JKP. Sehingga hal yang kita lakukan di konteks ini adalah bagaimana kita memastikan terus para pekerja tau akan haknya, sehingga jika terjadi risiko PHK mereka bisa mendapatkan manfaat.

Begitu juga dengan kemudahan klaim JHT, kami juga sampaikan dengan dasar regulasi undang-undang 40 dan PP 46, PP 60 dan juga Permenaker 4 2022, maka kita sampaikan tata cara klaim JHT. Jadi jangan sampai mereka merasa tidak tau atau bahkan mereka telat untuk klaimnya. Begitu juga dengan JKP, JKP juga kita dorong terus sosialisasinya agar mereka bisa mendapatkan manfaat ya JKP. Selain uang tunai juga dapat manfaat pelatihan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan juga akses kerja.

Berikut, *slide* berikut ya. Kami meminta seluruh Kantor Wilayah khususnya di Jawa untuk paling tidak berkomunikasi dengan tiga perusahaan besar di masing-masing daerah yang memang berada di sektor garmen, tekstil dan alas kaki. Paling tidak kita bicara dengan 57 perusahaan dengan 361.000 peserta aktif, jadi ini mewakili kurang lebih 21% dari populasi pekerja di sana.

Ada tiga poin yang coba kami komunikasikan untuk pendalaman, yang pertama adalah kami mencoba mendalami kondisi perusahaan saat ini di perusahaan-perusahaan tiga besar tersebut paling tidak, lalu permasalahan apa yang terjadi dan kebijakan apa yang diharapkan. Sehingga paling tidak kami di BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memastikan sosialisasi program, tapi juga memastikan bahwa mereka aspirasi mereka bisa kita bantu sampaikan.

Dari hasil komunikasi kami dengan perusahaan-perusahaan tersebut paling tidak yang kami dapati kurang lebih 53% dari perusahaan tersebut memang mengalami penurunan pesanan, sehingga dampaknya pengurangan jam kerja dan hari kerja, jadi dampaknya akhirnya efisiensi. Ini lebih dari separuh menyampaikan hal tersebut. Tapi tadi kalau kita lihat memang sudah ada perusahaan yang mulai ada peningkatan pesanan juga 43%, tadi kita lihat di industri kulit dan alas kaki sudah mulai ada peningkatan, hanya sedikit yang masih membahas bahwa mereka masih dalam fase pandemi *covid* jadi 4%. Nah hasil yang kami coba gali sebagai mitra kepada mereka, mereka punya 5 aspirasi yang paling tidak mungkin bisa kami juga sampaikan di forum yang terhormat ini, mereka menyampaikan untuk juga bisa *survive* mereka butuh:

1. Kemudahan perizinan bagi para investor agar tidak kalah bersaing dengan negara berkembang lainnya.
2. Pendapatan upah minimum yang tidak membebani perusahaan.
3. Ada kesediaan bahan baku dalam negeri yang mudah dan murah, karena isu bahan baku juga isu penting bagi mereka.
4. Peningkatan pelatihan dan kemampuan kerja; dan
5. Insentif pajak.

Inilah hal-hal yang coba kita dalami selain kita berkomunikasi tentang manfaat program, kami juga berkomunikasi tentang apa yang terjadi di setiap perusahaan di kondisi saat ini.

Berikut, berikut kami sampaikan bagaimana data dari klaim JHT yang berasal dari sektor tekstil, alas kaki dan garmen. Kalau kita lihat dari tahun 2023 total klaim JHT itu ada 251.000 yang berasal dari sektor tekstil dan alas kaki itu 17%, tahun 2024 memang sedikit mengalami kenaikan yaitu 20% yang dari sektor alas kaki.

Jadi kalau tadi tekstil dan alas kaki. Jadi kalau tadi terlihat bahwa PHK-nya meningkat, tetapi di sisi klaimnya kita lihat juga sedikit meningkat kurang lebih 3%. Jadi ada tren yang sama dibandingkan dengan berita yang di luar, tapi peningkatannya kurang lebih 3%. Jadi kalau sampai dengan bulan Mei data ini adalah per bulan Mei ini total klaim untuk tekstil dan alas kaki adalah 12.500 dengan manfaat nominal yang sudah diberikan adalah 385 miliar rupiah. Kalau total tahun ini sampai dengan bulan Mei di luar tekstil alas kaki adalah 62.000 dengan total klaim 1,6 triliun rupiah untuk klaim JHT.

Berikut, ya. Berikut ini ada JKP, kalau tadi JHT ini adalah JKP. JKP paling tidak yang kita lihat adalah bar chart yang warna biru dan warna abu-abu. Di

tahun 2022 waktu JKP baru dimulai total klaimnya adalah kasus klaimnya adalah 10.000, lalu dari kasus PHK 25.000, itu artinya 40% dari yang ter-PHK klaim JKP, paling tidak kita melihat bahwa *awareness*-nya masih di bawah 50%. Tahun berikutnya semakin membaik, karena dari klaim 63.000 maaf dari PHK 63.000 yang warna abu-abu klaimnya 53.000, itu artinya *awareness* dari mereka yang terkena kasus PHK 84% sudah melakukan klaim JKP. Dan di tahun berikutnya tahun ini itu klaim rasio untuk klaimnya semakin membaik 89,8% hampir 90%, dari 27.000 yang terkena PHK 24.000 itu melakukan klaim JKP. Kalau yang warna oren di Tengah adalah jumlah dari kasus klaimnya.

Jadi JKP karena manfaat JKP sampai 6 bulan, maka kita lihat di tahun pertama dari 10.000 total yang mendapatkan manfaat karena ini paling tidak baru bulan ketiga ya 29.000, di tahun 2023 di 53.000 yang sudah klaim karena sudah *awareness* tinggi 237.000, artinya satu orang sudah klaim ke bulan keempat atau bulan kelima, untuk klaim JKP-nya berikutnya juga tahun 2024. Artinya dari riset ini menunjukkan bahwa mereka sudah lebih *aware* tentang JKP.

Lalu apa yang menyebabkan mereka tidak *eligible*, karena dari, dari total klaim total kasus enggak semuanya *eligible*, yang tidak *eligible* itu biasanya karena bukan peserta JKN karena syaratnya adalah peserta JKN. Yang kedua juga masa iurannya belum 12 bulan, karena JKP kan mensyaratkan mereka sudah menjadi peserta adalah 12 bulan atau tidak mengajukan klaim lebih dari 3 bulan. Nah ini yang kita hindari karena jangan sampai mereka tidak tahu sehingga klaimnya lebih dari 3 bulan, tapi intinya *awareness* ini semakin membaik karena 90% dari peserta atau yang ter-PHK sudah mengklaim JKP.

Berikut, ini gambaran keterangan dari tadi manfaat JKP kita lihat pada saat Februari 2022 saat kita memulai baru ada 81 kasus klaim. Hari ini kita sudah lihat totalnya ada 88.438 klaim. Jadi dari tahun 2022, 2023 dan 2004 terus meningkat. Kita melihat pola yang hampir sama di setiap bulan Februari itu klaim JKP cukup meningkat mungkin pola-pola kontrak seperti itu sehingga di Januari berakhir mereka terus selalu klaim JKP. Februari 2024 pun demikian, garisnya naik tinggi lalu Maret, April kembali normal, 2022, 23 pun sama. Jadi ini kira-kira *pattern*nya sampai dengan saat ini 59, 88.000 dengan total manfaat 593 miliar rupiah.

Berikut, ini sedikit profil dari penerima JKP, karena yang terbesar ada di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kalau kita lihat dari sektor usaha memang terbanyak adalah perdagangan dan jasa dan aneka industri, di mana di sana terdapat garmen, alas kaki dan tekstil di aneka industri yang 33.000 kasusnya. Terbanyak memang pertimbangan nilai efisiensi, tadi kita lihat di depan karena *order* berkurang maka mereka mengefisiensi.

Berikut, *slide* berikutnya, itu tadi beberapa *update* kami terkait dengan isu PHK dan juga kita mencoba melihat bagaimana yang bisa kita lakukan

untuk memastikan perusahaan-perusahaan *aware* dan karyawan *aware* bahwa mereka punya hak, manfaat, jaminan sosial.

Berikutnya penyelesaian kasus-kasus terhadap klaim BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut, lanjut. Sampai dengan posisi hari ini sampai dengan posisi Juni total klaim yang masuk adalah 1,6 juta klaim dengan nilai nominal klaim yang sudah dibayarkan adalah 25 triliun rupiah. Tahun lalu total klaim yang masuk adalah 4 juta dengan nominal santunan manfaat yang sudah diberikan adalah 52 triliun rupiah. Jadi ini sampai dengan bulan Juni angkanya polanya hampir mirip 25 Triliun di pertengahan tahun, jadi perkiraan akhir tahun kemudian angkanya akan mendekati angka 50 sampai 54 triliun rupiah.

Beasiswa sampai dengan hari ini kurang lebih sudah ada 120.000 anak melakukan beasiswa. Tahun lalu 82.000 anak dengan nominal 347 miliar, tahun ini sampai dengan bulan Juni 47.000 dengan 208 miliar. Jadi kalau kita lihat totalnya kurang lebih sudah hampir 120.000 anak dari pekerja yang mendapatkan beasiswa dari TK hingga perguruan tinggi.

Berikut terkait dengan layanan, nanti mungkin Ibu Rosita akan menambahkan, paling tidak kita memegang beberapa pijakan-pijakan hukum dalam konteks bagaimana kita menjaga kualitas layanan kita mulai dari Undang-Undang 24, Undang-Undang 25, lalu juga peraturan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga peraturan-peraturan direksi yang memang kita pegang. *Slide* berikutnya akan menggambarkan sedikit bagaimana SLA yang selama ini kita pegang.

Slide berikutnya, inilah SLA yang kita jadikan acuan. Jadi berdasarkan Undang-Undang 24 kita punya SLA 5 hari kerja untuk menangani pengaduan 5 hari kerja, lalu 30 hari kerja untuk mereka kita minta lengkapi data-data dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, lalu 60 hari kerja untuk kita prosesnya dan 14 hari kerja untuk kita berikan jawaban dan responnya. Ini SLA yang kita jaga, yang memang selama ini jadi patokan dan juga pencapaiannya selama ini sudah jauh lebih cepat daripada SLA yang ada ini.

Berikut, ini beberapa ekosistem pengaduan yang kita siapkan mulai dari *contact center* termasuk juga ada email, ada sosial media, ada WhatsApp, ada webchat, juga layanan yang *auto answer* jadi yang bisa dibantu langsung jawab melalui WhatsApp, melalui juga *chat* juga mulai dengan IVR juga digunakan di 175 dan juga di *frontliner*. Saat ini memang yang ke *frontliner* kurang lebih tinggal 20 sampai 25%, selebihnya sudah menggunakan kanal digital, termasuk juga layanan dari kemitraan Halo JKP, lapor.go.id, ombudsman, dan OJK.

Lanjut, di *contact center* kita lihat hari ini total interaksi sampai dengan bulan Mei ada 2,5 juta interaksi. Yang datang ke cabang itu yang warna merah

yang di bawah kanan yang *smile* itu aplikasi kami namanya *smile* itu adalah aplikasi yang ada di cabang. Saat ini dari 2,5 juta Interaksi yang datang ke cabang jumlahnya ada 427.000 plus 17.000, jadi kurang lebih 440.000, 441.000. Jadi 17% yang datang ke cabang, ke CS, selebihnya sudah menggunakan *contact center*, menggunakan *auto answer*, termasuk juga di sana ada *live chat*, ada WhatsApp, ada IVR dan juga selama ini kita punya mitra halo JKP, lapor tadi juga aplikasi kita.

Jadi kalau yang *contact center* selain itu juga email, ada Instagram, ada *Inbound*, telepon masuk, ada yang *outbound* juga dan juga *webchat*. Ini yang sekarang interaksi terakhir adalah 2,5 juta interaksi, 17% adalah ke cabang, selebihnya sudah tidak harus ke cabang.

Berikut, agenda ketiga bagaimana evaluasi terhadap kepesertaan dan capaian dari Pekerja Migran Indonesia.

Slide berikutnya, di konteks manfaat ada 21 manfaat PMI yang berdasarkan Permenaker terbaru Nomor 4 2023 ada 5 manfaat yang tetap, ada 9 peningkatan manfaat dan ada 7 manfaat baru yang bisa didapatkan oleh Pekerja Migran Indonesia, yang selama ini memang kita dapatkan aspirasinya dan ini sudah ada Permenakernya dan sudah kita mulai sosialisasi sejak tahun lalu. Dan ini harapannya bisa meningkatkan kepesertaan karena sesuai dengan harapan mereka.

Berikut, nah ini adalah data dari klaim JKK, JKM PMI, sampai dengan posisi hari ini kita sudah membayarkan 2.368 kasus sebesar 55 miliar rupiah, terbesar masih adalah yang warna biru adalah karena gagal berangkat, yang kedua yang warna orange adalah karena pemulangan karena PMI bermasalah, ini yang masih nomor dua besar. Jadi kalau kita lihat detailnya gagal berangkat itu 656 kasus dengan nilai manfaat atau klaim 6,3 miliar, untuk pemulangan bermasalah itu 556 kasus dengan nilai 2,8 miliar.

Yang berikutnya dari sisi kasus lebih sedikit, tetapi dari sisi nominal lebih besar yaitu kematian JKM sebelum dan setelah bekerja. Berikutnya juga yang juga besar tapi nominal besar adalah santunan kematian JKM selama bekerja, yaitu 22 miliar, itu yang cukup besar jumlah klaimnya.

Berikut, pertumbuhan pesebaran PMI sampai dengan 2024 kita lihat sebesar 100%, jadi dari 2021 235.000, hari ini 592.000, jadi sudah hampir 600.000 naik hampir 2,5 kali lipat. Kita lihat memang yang pertumbuhan tertinggi itu mulai terlihat ada di tahun 2023 dan 2004 ini sampai dengan bulan Mei.

Lanjut, sampai dengan bulan Juni ini ada paling tidak kita punya perwakilan di tiga negara ya Bu Oci ya, ada di Hongkong, Taiwan dan di Brunei. Tapi kalau kita lihat total sebarannya memang yang saat ini menjadi peserta

terbanyak dari Taiwan 216.000, diikuti oleh Malaysia 175.000 dan Hongkong 68.000. Ini lima besarnya Korea Selatan dan Jepang.

Lanjut, khusus untuk Malaysia dikarenakan ada regulasi terbaru di Malaysia untuk sementara mengurangi PMI, sehingga PMI baru untuk Malaysia khusus Malaysia yang sejak bulan Mei lalu sudah ada surat dari Kemnaker kita liat ada terjadi penurunan untuk PMI baru dari untuk Malaysia. Jadi semula masih 14.000, 11.000 dan bulan ini bulan Juni terakhir ini 4.200. Ini khusus untuk Malaysia terjadi penurunan karena adanya regulasi di negara penempatan.

Berikut, *slide* berikutnya, beberapa hal yang kami lakukan karena untuk mendorong PMI ini kita butuh *stakeholder* dan kerja sama dengan-dengan beberapa Kementerian. Di Kemenaker tentu saja kita butuh dukungan untuk di kaitan dengan regulasi-regulasinya, juga termasuk adnaker-adnaker, karena kami lihat tidak semua adnaker punya *phase* yang sama jadi kita bicara dengan adnaker. Beberapa negara memang adnakernya cukup aktif dan sangat peduli, tapi ada beberapa lagi yang memang kurang aktif sehingga tidak mudah bagi PMI untuk mendapatkan layanan di sana dan juga sosialisasi ke beberapa negara.

Dengan BP2MI kita sinerginya tentu saja bagi CPMI dan PMI mulai dari integrasi sistem dengan siskop 2 PMI dan juga penyusunan kurikulum OPP, orientasi para pemberangkatan, ini kita sudah sama. Dengan Kementerian Luar Negeri kita PKS integrasi sistem dan pemanfaatan dalam rangka perlindungan kita menggunakan portal peduli PMI. Itu untuk integrasi dan untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan, dengan kantor perwakilan tadi kita saat ini dengan-dengan Taiwan, dengan Kuala Lumpur, untuk SIPERMIT Brunei Darussalam, dan juga Hongkong kita untuk integrasi sistem untuk perpanjangan kontrak PMI.

Dengan kementerian Kemenko ekonomi penerbitan Perpres tentang penguatan tata kelola penempatan PMI yang melibatkan 27 K/L. Karena memang kita melihat untuk bisa meningkatkan kepesertaan PMI ini butuh dukungan dari banyak K/L karena regulasinya juga harus *align*, sejalan.

Untuk Kemenhub kami juga membahas bagaimana perlindungan bagi ABK. Ini untuk ABK, mereka sangat ingin dilindungi, sehingga kita koordinasi apakah dia akan dikategorikan sebagai PMI *c-base* atau PU. Karena menurut Kemenhub ini sebenarnya bukan PMI karena di negara tersebut hanya sebentar-sebentar saja Pak Pimpinan jadi hanya banyakan di laut, tapi kita prinsipnya kita memastikan mau pakai skema apa untuk *c-base* ini. DJSN untuk pengawasan dan juga asosiasi. Tadi dengan Malaysia kami dengan FOMEMA, di mana FOMEMA ini yang biasanya melakukan pemeriksaan kesehatan bagi PMI di sana. Harapannya setiap mereka perbaruan setiap tahun mereka bisa kita perpanjang.

Berikut, sosialisasi edukasi kita tidak hanya bersama dengan Kementerian tetapi juga di kantor-kantor kami yang memang banyak kantong-kantong PMI-nya dari 66 kantor paling tidak. Untuk luar negeri kita kebanyakan menggunakan webinar, sosialisasi bersama dengan Kemenaker dan juga Adnaker, paling tidak di 10 kedutaan secara daring itu dengan Malaysia, Brunei, Singapura, Hongkong, Saudi, Kuwait, Taiwan, Australia dan Nigeria, serta Ceko. Dan juga sosial media kita siapkan Instagramnya dan Facebooknya untuk komunikasi dengan mereka, paling tidak kita bisa *update* program di sana dan mereka bisa bertanya di media tersebut.

Berikut, perluasan kanal kita memang menggunakan kantor cabang-cabang kami untuk bisa melayani, termasuk 60 kantor layanan satu atap dan BP3MI, portal PMI, portal SIPERMIT-nya Malaysia, *zipcode*-nya Taiwan ini kita gunakan juga, termasuk tadi beberapa kanal fisik yang sudah kita siapkan di Hongkong, Taiwan dan Brunei. Kedepan berikutnya adalah Korea Selatan dan Jepang ini yang akan *on progress* kita siapkan kanal fisik bagi mereka.

Kalau pengaduan kita punya 175 dan juga *click call to* JMO. Jadi dari aplikasi Jamsostek *mobile* kita, bagi PMI mereka punya-punya *button*, punya tombol di JMO tersebut untuk bisa *contact* ke kita untuk bertanya tentang program. Jadi aplikasi ini muncul di aplikasinya JMO-nya PMI, jadi aplikasi JMO dalam negeri enggak ada adanya di aplikas JMO-nya ya dan itu bebas pulsa jadi memudahkan mereka untuk komunikasi.

Berikut, nah ini beberapa hal yang membutuhkan dukungan. Tentu saja kita melihat masih banyak PMI yang *undocumented* di Malaysia. Jadi kalau kita PMI di Malaysia banyak, ternyata kebanyakan *undocumented* sehingga kalau untuk kita melindungi sulit karena kita harus mereka harus *documented*. Mungkin kita butuh juga dukungan untuk bisa membantu mereka agar mereka punya dokumen apakah kontrak kerja mereka bisa dijadikan sebagai dokumen. Paling tidak ini butuh juga dukungan dari perwakilan Indonesia setempat dan juga adnaker untuk memastikan bagaimana mereka yang *undocumented* ini bisa kita lindungi.

Kemudahan buka kanal di luar negeri. Kami memang berkoordinasi dengan Kemenlu untuk bisa membuka kanal, paling tidak satu *desk* saja buat kita cukup, satu meja saja buat kita cukup dan bahkan enggak harus setiap hari pun cukup, hari-hari tertentu, hari-hari mereka libur itu cukup. Jadi itu membantu kita untuk hadir dan memberikan penjelasan dan membantu proses klaim jika dibutuhkan.

Tadi perlindungan awak kapal kita melihat banyak awak kapal yang punya risiko kerja juga tinggi dan kami masih membahas dengan Kemenhub apakah ini akan kita gunakan skema PMI atau gunakan skema pekerja terima upah.

Perlindungan pemagangan luar negeri, perlu regulasi untuk perlindungan pemangang di luar negeri karena selama ini penempatan luar negeri yang skemanya pemagangan itu tidak diharuskan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saya rasa ini mereka juga punya risiko yang sama, hanya status saja yang berbeda sehingga harusnya mereka bisa kita lindungi.

Berikut, demikian Bapak Pimpinan dan Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX *update* kami terkait dengan undangan, mungkin nanti kita bisa dalam lagi beberapa hal penting.

Terima kasih, saya kembalikan Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Direktur Utama BPJS Tenaga Kerja, Bapak Anggoro Eko Cahyo yang hadir lengkap bersama semua direksi dan jajarannya sudah menyampaikan tiga poin rapat kita dengan presentasi tadi.

Kita akan berlanjut ke Dewas BPJS Ketenagakerjaan yang juga datang lengkap, kepada Pak Muhammad Zuhri kami persilakan.

KETUA DEWAN BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI BAHRI):

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi IX yang hadir pada kesempatan ini,
Anggota Komisi IX yang hadir pada pagi hari ini,
Direktur Utama dan jajaran Direksi yang kami hormati, dan
Rekan-rekan dan pengawas yang hadir pada pagi hari ini.**

Alhamdulillah Pimpinan kami bertujuh Dewan Pengawas hadir lengkap untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX. Ada Pak Agung, ada Pak Haji Yayat, ada Pak Aditya, di belakang ada Pak Kusari, ada Pak Subhan Gatot, di paling belakang ada Pak Iman Nuril. Karena komitmen kami di Dewan Pengawas di dalam rangka mengawal dan mewujudkan rencana strategis program jaminan sosial ketenagakerjaan sampai 2026, izin kami menyampaikan prolog terkait dengan bagaimana.

KETUA RAPAT:

Pak Zuhri, Pak Zuhri, tolong didekatkan aja *mic*-nya, Pak.

KETUA DEWAN BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI BAHRI):

Izin kami menyampaikan prolog untuk bisa menyampaikan tiga komitmen yang menjadi pilar pengawasan terkait dengan memastikan terkait dengan terwujudnya pelaksanaan rencana strategis program jaminan sosial ketenagakerjaan.

1. Terkait dengan mengawal kelembagaan yang bermanfaat.
2. Mendorong penyelenggaraan organisasi yang bertata kelola baik dan
3. Mengawasi kesehatan keuangan melalui pertumbuhan aset dan kualitas aset.

Atas dasar tiga pilar ini, kami menetapkan tiga fokus pengawasan yaitu, *coverate* dan *sustainability*, *service excellence* dan *new optimization*. Dari tiga fokus utama terkait dengan agenda pada tiga agenda pada hari ini, maka kami fokus untuk bisa melakukan fokus pengawasan pada aspek kepesertaan yaitu mencapai *coverage sustainability* kepesertaan dan meningkat literasi jaminan sosial atau *awareness*. Yang kedua yaitu aspek pelayanan yaitu mengimplementasikan *new service blueprint* dan mengoptimalkan kanal layanan, khususnya terkait dengan digital PMI dan syariah.

Lanjut, jadi agenda yang kita apa nama, kita terima untuk bisa disampaikan yaitu, tiga agenda. Untuk agenda yang pertama yaitu, evaluasi terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja atau buruh terdampak PHK di berbagai daerah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anggoro, Direktur Utama terkait dengan fenomena PHK, termasuk di dalamnya kaitan dengan sektor-sektor yang mengalami PHK dan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPJS terkait dengan penanganan terkait dengan apa namanya buruh yang terdampak PHK.

Lanjut, ini tadi hanya menegaskan saja yang disampaikan oleh Pak Anggoro sebagai Direktur Utama, untuk bisa menjelaskan terkait dengan apa namanya perbandingan klaim JKP dengan jumlah PHK. Memang apa namanya ada-ada *gap* antara apa namanya jumlah PHK dan klaim JHT eh klaim JKP, ada tiga tadi sudah disampaikan saya kira ini hanya penegasan terkait dengan kenapa ini apa namanya *gap*-nya antara klaim dan jumlah PHK ini memang tidak sama.

Lanjut ini di dalam rangka penanganan PHK selain JKP juga peserta apa namanya peserta yang kena PHK juga melakukan klaim terkait dengan klaim

JHT biasanya. Nah di dalam rangka klaim JHT ini selain dilakukan secara *online* melalui JMO, Lapak Asik dan kanal-kanal kantor cabang yaitu layanan fisik, maka secara garis besar kita bisa memperhatikan dari tiga kanal yang BPJS sediakan, kanal kantor cabang yaitu layanan fisik itu lebih tinggi dari JMO maupun Lapak Asik.

Dari data yang kami sampaikan ini, maka hasil monitoring atau *fight tending* Dewan Pengawas ini ada tiga *clustering* yaitu, terkait dengan penyempurnaan dan optimalisasi kanal layanan fisik dan digital, lalu eligibilitas peserta JKP, nah yang terakhir sosialisasi dan edukasi dalam peningkatan *awareness*. Jadi untuk *clustering* pertama kita mendapatkan satu-satu apa namanya satu fakta bahwa masih terdapat penumpukan peserta di kantor cabang untuk apa namanya momen-momen tertentu memang itu terjadi.

Lalu yang kedua, masyarakat lebih percaya pada pelayanan fisik di kantor cabang untuk layanan dan informasi, walaupun memang peningkatan terkait dengan layanan JMO dan layanan lainnya. Yang ketiga, itu masih terdapat apa namanya belum stabilnya aplikasi JMO, sehingga ini juga berdampak terhadap layanan juga. Yang keempat yaitu, pemahaman layanan digital masyarakat atau peserta itu pada umumnya masih-masih rendah. Lalu yang kelima, belum optimal pengaturan kuota sistem antrian *online*. Saya kira lima hal ini yang kami temukan di lapangan di dalam melakukan *monitoring* di lapangan.

Lalu terkait dengan eligibilitas peserta JKP yaitu, pertama itu peserta peserta *existing* yang *eligible* belum sepenuhnya memahami program JKP. Saya kira ini memang perlu upaya-upaya untuk bisa mengedukasi dan mensosialisasikan lebih lanjut terkait program JKP ini. Lalu yang kedua, banyaknya PDS khususnya PDS program dan PDS tenaga kerja. Saya kira itu menjadi salah satu *problem* yang barangkali bisa kita dorong untuk bisa mengurangi terkait dengan PDS program dan PDS tenaga kerja ini. Nah yang terakhir klaster terakhir yaitu sosialisasi dan edukasi dalam peningkatan *awareness*. Itu satu itu literasi masyarakat mengenai program JKP masih rendah, yang kedua strategi komunikasi belum efektif menjangkau audiens baru yang meningkatkan brand *awareness*.

Jadi tiga *clustering* ini hasil dari *monitoring* Dewan Pengawas yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini, sehingga di dalam rangka untuk memberikan.

Lanjut. Nasihat, saran, nasihat dan pertimbangan Dewan Pengawas kepada manajemen tentu kita sudah menyampaikan terkait dengan penyempurnaan dan optimasi kanal layanan dan fisik dan digital itu kita sudah memberikan saran terkait dengan perbaikan sistem antrian. Nah itu sudah dilakukan perbaikan oleh manajemen, sehingga ini membantu terkait dengan antrian di cabang-cabang.

Yang kedua yaitu, meningkatkan kualitas layanan aplikasi JMO, Jamsostek *mobile*, secara berkelanjutan itu sudah kita lakukan untuk itu, dan ketiga perbaikan berkelanjutan pada platform digital, yang keempat mendorong digitalisasi layanan, yang kelima utilisasi JMO disesuaikan dengan kebutuhan peserta untuk meningkatkan *experience* dan *engagement*, yang keenam transformasi menyeluruh pada proses bisnis pelayanan kantor cabang sebagai lanjutan dari *new service blueprint*. Sehingga yang terakhir yaitu, kita sudah memberikan SNP, saran, nasihat dan pertimbangan terkait dengan meningkat, meningkatkan kualitas layanan dengan teknologi yang baru.

Yang lanjut, ya untuk *eligibilitas* peserta JKP kami sudah juga memberikan saran, nasihat, pertimbangan kepada manajemen yaitu yang pertama memastikan *law enforcement* pada PDS untuk meningkatkan kepatuhan dan manfaat JKP. Lalu yang kedua, menyusun strategi peningkatan kepesertaan dan kepatuhan pada pemberi kerja dengan meminimalkan PDS. Yang ketiga, mewujudkan integrasi data BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berbasis NIK, serta memelihara sistem penyelenggaraan JKP. Nah yang terakhir yaitu meningkatkan koordinasi pengawasan bersama dengan BPJS Kesehatan, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.

Lalu SNP yang terakhir terkait dengan agenda yang ke pertama, lanjut yaitu, sosialisasi dan edukasi dalam meningkatkan *awareness* SNP yang sudah kami sampaikan kepada manajemen itu ada empat yaitu, sosialisasikan tentang *eligibilitas* hak dan kewajiban program JKP kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, menjadikan kantor cabang sebagai *showroom* atau *marketing* galeri dan pusat edukasi, serta literasi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kantor cabang ini tidak hanya sekedar tempat untuk mengklaim, tapi juga sebagai *showroom* untuk bisa memberikan informasi dan edukasi kepada peserta. Nah ketiga, melakukan edukasi dan sosialisasi masif tentang program JKP melalui media sosial dan digital *marketing* untuk meningkatkan *awareness*. Yang keempat, yang terakhir yaitu melakukan *monitoring* dan *feedback* berkelanjutan untuk mengukur brand *awareness* untuk dilakukan penyesuaian strategi komunikasi.

Itu tiga, tiga *clustering* kita sudah sampaikan SNP-nya dan saya kira kita saya izin melanjutkan untuk membahas, menyampaikan terkait dengan agenda yang kedua yaitu penyelesaian atas kasus-kasus klaim peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, lanjut.

Jadi berdasarkan evaluasi dan hasil pengawasan, maka yang pertama perlu ditingkatkan jumlah petugas yang menangani pelayanan pengaduan dan keluhan. Yang kedua yaitu standarisasi product *knowledge* seluruh petugas *frontliner* dan percepatan *update* informasi *knowledge* kepada petugas *call center* 175. Yang ketiga optimalisasi kanal pengaduan di BPJS Ketenagakerjaan itu perlu untuk terus didorong sehingga lebih maksimal, lanjut.

Jadi saran, nasihat dan pertimbangan Dewan Pengawas kepada manajemen terkait dengan tiga hal yang kami sampaikan di depan. Yang pertama yaitu memastikan bahwa kanal layanan pengaduan dan keluhan yang tersedia dan menjalankan perannya dengan cepat dan responsif. Lalu yang kedua mendorong pengembangan kanal layanan informasi dan pengaduan melalui dukungan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan layanan melalui peningkatan fitur aplikasi JMO dan *upgrade* layanan *contact center* 175. Nah yang keempat, menyiapkan daftar *frequently asked question* terkait perubahan inovasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Mungkin itu untuk agenda yang kedua, SNP yang kami telah sampaikan kepada manajemen. Sehingga izin untuk melanjutkan agenda yang ketiga yaitu, evaluasi terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta capaian target kepesertaan Pekerja Migran Indonesia.

Lanjut. In tadi sudah disampaikan oleh, oleh Pak Anggoro, oleh direksi terkait dengan data kepesertaan PMI. Di tahun 2024 ada sekitar 584.820 ribu, 21 ribu, ya lanjut. Artinya ada peningkatan dari tahun ke tahun, maka beberapa hal yang kami temukan di dalam rangka *monitoring* kami terkait dengan PMI.

Lanjut. Yang pertama terkait dengan sosialisasi dan edukasi. Jadi kalau kita bicara tentang PMI tentu ranahnya ada tiga Pimpinan, ada ranah sebelum pemberangkat PMI diberangkatkan, itu saya kira perlu hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian. Yang kedua, setelah PMI sampai di negara tujuan. Yang ketiga yaitu PMI pulang atau menjadi purna PMI, itu saya kira tiga isu ini juga menjadi perhatian dari Dewan Pengawas. Ya atas dasar itulah maka kami di dalam rangka *monitoring* kaitan dengan PMI maka ada beberapa hal yang kami sampaikan, yang pertama terkait dengan sosialisasi dan edukasi:

Yang pertama itu belum optimalnya edukasi dan literasi program jamsostek penggunaan aplikasi digital.

Lalu yang kedua, kurangnya sosialisasi prosedur dan manfaat perpanjangan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di negara penempatan. Walaupun tadi Pak Anggoro sudah menyampaikan ada beberapa negara yang sudah apa namanya sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa me apa menjadi perpanjangan BPJS di di negara-negara tertentu, tapi di negara-negara yang lain saya kira ini perlu upaya-upaya yang sama untuk dilakukan seperti hal tersebut.

Yang ketiga yaitu strategi komunikasi belum-belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Sehingga yang yang terakhir terkait dengan koordinasi antara kementerian dan lembaga saya kira kami memandang ini belum optimal sepenuhnya, terutama dengan BP2MI, BP3MI, Kemenaker, Kemenlu, khususnya terkait dengan pengawasan dan penegakan regulasi. Sehingga dari dua hal ini mohon maaf ada empat, mohon maaf ada empat hal yaitu, yang ketiga terkait dengan kanal fisik dan digital yaitu, pertama terbatasnya kanal layanan fisik di negara penempatan menyebabkan PMI

kesulitan melakukan pendaftaran ulang dan dan pembayaran iuran. Yang kedua, belum tersedianya saluran komunikasi keluhan peserta PMI. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan kanal pendaftaran *online* mandiri oleh PMI dan ini diharapkan dapat diakses seluruh melalui JMO. Yang keempat, tidak adanya petugas BPJS Ketenagakerjaan di negara penempatan.

Nah yang terakhir terkait dengan *sustainability* kepesertaan yaitu, terkait dengan penggunaan mekanisme *reimbursement* untuk klaim JKK dan yang dianggap menyulitkan PMI, sehingga PMI lebih memilih asuransi yang diberikan pemberi kerja di negara penempatan, sehingga, lanjut.

Sehingga saran nasihat yang sudah kami sampaikan kepada manajemen terkait dengan sosialisasi dan edukasi, yaitu pertama sosialisasi masif kita mendorong manajemen untuk melakukan sosialisasi masif dan tepat sasaran untuk meningkatkan *awareness* pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, kami mendorong manajemen untuk lebih memanfaatkan seluruh media sosial dan digital *marketing* untuk mencapai audiens yang lebih luas.

Untuk SNP terkait dengan kolaborasi *stakeholder* kami sudah menyampaikan terkait dengan SNP-nya, yaitu penguatan perluasan kerjasama dengan stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan-jaminan sosial, khususnya terkait dengan PMI. Yang kedua, untuk melakukan kolaborasi intensif terkait dengan pembangunan sistem digital untuk kemudahan pelayanan bagi CPMI atau PMI. Nah yang ketiga, kami mendorong kepada manajemen untuk melakukan koordinasi dengan BP2MI dan Kementerian/Lembaga terkait dengan memantau kepatuhan perusahaan penempatan PMI.

Lanjut. Untuk kanal fisik dan digital ada lima saran, nasihat, pertimbangan yang sudah kami sampaikan kepada direksi yaitu, terkait dengan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan khususnya melalui peningkatan fitur aplikasi JMO, *call center* 175 dan pembukaan kanal fisik untuk pelayanan PMI di negara penempatan. Yang kedua, penempatan infrastruktur dan sumber daya dalam mendukung pembentukan kanal layanan fisik. Yang ketiga, menyiapkan saluran komunikasi untuk menangani keluhan dan pengaduan PMI. Yang keempat, melakukan evaluasi atas pemanfaatan kanal layanan fisik dan digital di negara penempatan. Nah yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas layanan dengan mengadopsi teknologi baru untuk mempermudah proses pendaftaran dan klaim, serta perbaikan layanan lainnya.

Terkait dengan *sustainability* kepesertaan ada tiga SNP yang sudah kami sampaikan ke manajemen. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi atas sosialisasi yang telah dilakukan dan mengkaji berbagai strategi diseminasi informasi yang efektif, baik saat pra keberangkatan maupun setelah-setelah di negara penempatan.

Lalu yang kedua, melakukan evaluasi N to N, proses bisnis PMI mengacu kepada Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial PMI, nah yang terakhir menyusun kebijakan penguatan pengelolaan kepesertaan, serta *roadmap* yang lebih komprehensif.

Saya kira itu Pimpinan yang bisa kami sampaikan dan saya kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih dari Dewas BPJS Ketenagakerjaan.

Kita sudah mendengarkan paparan dari dua lembaga BPJS dan Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan lakukan pertanyaan pendalaman kami langsung yang pertama dari ibu Irma Suryani Chaniago, kami persilakan.

F-NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati,
BPJS tenaga kerja manajemen dan berikut jajaran,
Dewas dan berikut seluruh jajaran yang saya hormati.**

Yang pertama, dari seluruh paparan yang sudah disampaikan ada tiga hal yang ingin saya kritisi, yang pertama terkait kepesertaan, kedua PHK, kemudian layanan, yang ketiga layanan.

Yang pertama, saya lihat di *slide* 6, sebaran provinsi kepesertaan aktif di sektor industri garmen, tekstil dan *footwear*. Di sini kita bisa lihat ada 6 provinsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang memang tenaga kerjanya banyak. Tapi kita bisa lihat Jawa Barat, Jawa Tengah itu kepesertaannya rendah sekali. Yang pertama, Jawa Barat 40,55% dan Jawa Tengah 33,61%. Nah yang 60%-nya ke mana ini? Kenapa tidak bisa menjadi anggota BPJS tenaga kerja? Ini alasannya apa? Kenapa? Ya, terus bagaimana bisa memenuhi target kepesertaannya. Ini rendah banget *nih, enggak* kerja kali ini ya teman-teman BPJS *nih, enggak* jemput bola duduk-duduk aja di apa namanya di kursinya nunggu peserta datang sendiri lewat *online*.

Tadi BPJS, tadi Dewas bilang bahwa, melalui *online* itu enggak terlalu signifikan untuk bisa menambah kepesertaan. Karena masyarakat Indonesia malas, banyak yang malas buka-buka itu buka *website*, masih banyak yang malas, karena mereka juga malas baca, malas-malas apa ya, ingin tahunya rasa ingin tahunya masih kecil terkait dengan asuransi atau apa namanya subsidi kesehatan kita ini, subsidi ketenagakerjaan mohon maaf.

Nah artinya, saya melihat ini kalau dirata-rata apalagi Banten, Jawa Timur nih kecil sekali, terus targetnya seperti apa sih sebenarnya? Target kepesertaannya itu seperti apa? Berapa sebenarnya target dari BPJS tenaga kerja ini? Targetnya itu berapa per tahun, kan enggak ada. Kalau lihat dari *slide* 6 ini saya *enggak* ngelihat ada target, karena di bawah 50%, bahkan di tempat-tempat lain masih nol koma nol koma, gila *nih*, jauh banget *nih* kinerjanya menurut saya.

Ini di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, Lampung, ini nol koma nol koma semua, Pak. Itu Pak Dewas tuh mesti di genjot lagi tuh ke apa namanya pengawasannya dengan-dengan manajemen, *enggak* usah takut-takut Pak, enggak bakalan juga mereka bisa ganti Bapak. Mesti dikasih tau bahwa ini capaian apa namanya motivasi untuk mencapai targetnya *enggak* ada kalau menurut saya ini kalau lihat dari tabel yang disampaikan ini, rendah sekali.

Kemudian yang kedua, PHK. Dengan banyaknya PHK yang terjadi sekarang itu menurunkan kepesertaan pastinya. Sementara peningkatan kepesertaan menurut saya ini juga belum signifikan ya, bisa dilihat *nih* tadi yang keluar 6 PHK 6% misalnya itu ada kenaikan 3%, 50%-nya cuma, nah itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga terkait dengan, mohon maaf sebentar saya cek lagi ya. Nah klaim, terkait dengan klaim. Saya masih melihat klaim kita ini masih ada selisih di klaim, di klaim ini masih ada selisih, Pak. Hampir 10.000-an *nih* rata-rata selisih klaim yang tidak bisa diproses. Sebentar saya cek tadi saya lihat ini dia, *nih* perbandingan klaim JKP dengan jumlah PHK ya. Jadi klaim JKP-nya terhadap PHK.

Ini tahun 2022 dari jumlah, jumlah klaim JKP-nya 10.000, data PHK-nya 25.000. Kemudian 2023 selisihnya 10.000, 2024 lumayan nih selisihnya 2.800. Nah kenapa bisa terjadi selisih ya, alasannya apa *nih*, kenapa tidak tidak bisa diklaim, dokumen yang tidak lengkap untuk mengajukan klaim atau seperti apa. Kan ini artinya ada peserta yang dirugikan di sini dan ini harus jelas bagaimana Dewas juga mengawasi masalah klaim ini ya.

Kalau saya lihat ini dari tabel yang disampaikan Dewas nih ya masih ada selisih. Artinya ada masyarakat yang masih dirugikan *nih* terkait masalah klaim yang tidak bisa di apa namanya tidak bisa diselesaikan. Apa masalahnya? Harus disampaikan *nih* kenapa mereka tidak bisa menerima klaim, padahal mereka sudah bayar, ini yang ketiga.

Kemudian yang keempat, saya melihat masih rendahnya kepesertaan ini karena strategi BPJS tenaga kerja dalam rangka meraih ya, meningkatkan kepesertaannya tidak-tidak masif. Kayak orang nerima, *nerimo gitu loh* apa adanya aja asal dapat wis yang ada aja dikelola, tapi tidak punya motivasi untuk bisa meningkatkan. Padahal pilkada itu Pak kalau Bapak sedikit cerdas, pilkada-pilkada kita ini di seluruh Indonesia ini bisa Bapak, bisa Bapak dapat

dapat banyak loh Ini dari pilkada ini, untuk yang non-penerima upah, yang 16.800 itu banyak, Pak.

Kemarin saya sosialisasi BPJS tenaga kerja tiga kali itu saya mencoba, mencoba melihat karena memang ada satu calon yang ikut dengan saya, saya suruh ikut gitu, saya suruh bayar dia mau, mau. Dan dia bilang bahwa kumpulkan KTP nanti 1 bulan atau 2 bulan itu dia bayarin, dia mau. Artinya kan ini progres Pak, bisa-bisa dilakukan walaupun mungkin nanti tindak lanjutnya, nah ini dia. Memang dari pengalaman yang kami lakukan di sosialisasi kita yang dulu kita dapat 3 bulan gratis itu, itu maksimal 30% yang lanjut, selebihnya enggak lanjut ya, tapi kita kan memang tetap harus memotivasi, tetap harus melakukan gitu *enggak* bisa *enggak*. Nah jadi Bapak juga harus cerdas dalam rangka meningkatkan kepesertaan. pilkada ini banyak loh Pak yang bisa dimanfaatkan, Bapak ketemuin aja mereka, sampaikan program Bapak itu bisa mereka pakai juga. datengin juga bupati-bupatinya gitu.

Saya yakin kalau bupatinya cerdas gitu dan memang punya tanggung jawab terhadap rakyatnya mereka pasti mau membayarkan, nah ini kan *enggak* dilakukan, ini rendah banget loh Pak nih saya lihat *nih*, sedih juga ngelihatnya gitu padahal harusnya kewajiban BPJS tenaga kerja untuk bisa meningkatkan kepesertaan itu bisa lebih baik lagi dari yang disampaikan di sini, ini menurut saya *enggak* kerja, belum kerja ini namanya. Mohon maaf ya Pak, ini menurut saya masih belum kerja, baru kayak orang gini ya kayak bupati, walikota, gubernur hari ini yang cuma bisa *ngabisin* APBN, tapi *enggak* bisa meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Nah sama dengan Bapak, menghabiskan anggaran perusahaan, negara tapi *enggak* bisa meningkatkan kepesertaan secara signifikan. Artinya di sini tidak ada profesionalitas, tidak ada keinginan untuk bisa berprestasi lebih baik bagaimana bisa mencapai target.

Nah itu yang memang harus diwaspadai dan harus menjadi perhatian. Sayang tanggung jawab moral kita untuk bisa memberikan jaminan sosial kepada masyarakat itu menjadi tanggung jawab kami di Komisi IX dan Bapak sebagai mitra. Tapi kalau seperti ini datanya ya belum kerja. Nah ini harus kerja Pak, banyak Pak cara yang bisa dilakukan tuh pedagang pasar tuh banyak tuh yang belum tahu tentang BPJS tenaga kerja, mereka tau BPJS Kesehatan tapi mereka *enggak* tahu apa itu BPJS tenaga kerja, padahal banyak yang bisa dijual, nah ini yang menurut saya harus diperbaiki.

Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, saya mau tanya PHK yang terjadi hari ini itu pasti menurunkan kepesertaan kan, pasti menurunkan Pak ya. Nah untuk bisa gitu ya menambah kepesertaan lagi ini apa yang bisa dilakukan?

Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan kepada BPJS Tenaga Kerja dan Dewas, tolong Dewas ini diperhatikan sekali Pak, karena tadi Bapak bicara soal apa namanya informasi digital yang belum efektif. Karena rakyat Indonesia memang pada hari ini gitu yang di daerah Pak ya kalau di perkotaan tuh sudah

bisa lah, tapi di daerah tuh masih belum bisa Pak menerima itu. Banyak yang masih punya telepon Nokia kecil yang zaman-zaman dulu itu masih banyak yang punya itu gitu, belum ada belum punya android, jadi masih sulit mereka menerima penjelasan melalui digital.

Nah metode apa yang bisa Bapak lakukan strategi apa yang bisa dilakukan bisa mencapai ke seluruh masyarakat Indonesia, baik yang penerima upah maupun yang bukan penerima upah. Saya kira itu saja.

Terima kasih banyak, saya tutup dengan

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Dikritik tapi juga sekaligus dikasih usul saran, minimal yang pilkada-pilkada tu segera dipantau bisa diatur segera.

Berikutnya kita ke Ibu Elva Hartati, kami persilakan.

F-PDIP (Dra. ELVA HARTATI, S.IP., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan beserta teman-teman Komisi IX yang saya hormati,
Bapak Direktur Utama BPJS beserta Direktur-Direktur yang lain,
Bapak-Bapak Dewan Pengawas ya, serta jajarannya.**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih atas paparannya. Di sini saya akan mencermati yaitu, berdasarkan *slide* yang kelima dari paparan Dewan BPJS Ketenagakerjaan, yang mana menunjukkan data-data klaim jaminan kehilangan pekerjaan JKP.

Berdasarkan sebesar 10,137 dan data pemutusan hubungan kerja PHK sebesar 25,114 pada tahun 2022. Kemudian JPK sebesar 53,741 dan PHK sebesar 63.806 pada tahun 2023. Kemudian JPK sebesar 24.470 dan PHK sebesar 27.222 pada tahun 2024. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat tren klaim JPK dan kasus PHK yang sangat fluktuatif.

Tahun 2022 mencapai klaim 40% JPK dari total PHK tahun 2023 mencapai 80%, 84% klaim JPK dari jumlah total PHK tahun 2024 mencapai sekitar 90%. Pertanyaannya, apakah yang menyebabkan lonjakan tren ini dan

bagaimana kebijakan yang ditempuh? Apakah karena kondisi ekonomi atau ada hal yang lain?

Yang kedua, apakah memang JPK saat ini berdasarkan klaim di atas sudah efektif melindungi pekerja yang terkena PHK dan bagaimana tingkat kepuasan mereka terhadap program ini?

Yang ketiga, bagaimana prosedur dan durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim JPK, apakah ada hambatan yang sering dihadapi oleh para peserta?

Yang keempat, apakah manfaat yang diberikan melalui JPK cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yang terkena PHK? dan bagaimana hasil survei kepuasan peserta terhadap program JPK, apakah mayoritas peserta merasa puas dengan layanan yang diberikan? Dan selanjutnya, apakah ada perbaikan yang dilakukan berdasarkan umpan balik dari peserta?

Selanjutnya *slide* yang ke-19 terkait penguatan dan perluasan kerjasama dengan *stakeholder* dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaannya, khususnya terkait PMI, Pekerja Migran Indonesia. Siapa saja *stakeholder* yang telah terlibat dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial bagi PMI kita ini dan bagaimana kontribusi mereka?

Yang kedua, apa langkah-langkah konkret yang telah dilakukan dan bagaimana efektivitas kerja sama yang telah terjalin dalam mendukung program jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia?

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Berikutnya kami persilakan kepada Ibu Dian Istiqomah.

F-PAN (DIAN ISTIQOMAH, S.Kep):

Terima kasih, Pimpinan, dan

**Selamat pagi untuk rekan-rekan Anggota Komisi IX,
Selamat pagi juga untuk Direktur BPJS Ketenagakerjaan beserta jajarannya, dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan.**



Beberapa minggu ini saya agak pusing juga baca berita di media, di mana-mana banyak PHK. Tentunya ini berimbas dengan deringan telepon saya dari dapil, karena sebagian besar dari mereka memang benar-benar sudah berhenti bekerja dengan adanya PHK ini. Seperti biasanya, kami ini sebagai *call center*, jadi kalau masalah di dapil mereka akan ke kami dan pasti kami akan kejar-kejar Bapak-Bapak yang di sini kan.

Pertanyaan saya, ini kan baru awal, baru awal terjadinya PHK ini, baru awalnya saja. Ini sudah sekitar 10.000, oh 13.000 lebih ya itu baru yang dari garmen, belum dari rumah sakit, belum dari tempat-tempat lain. Jadi ketika saya berhitung ini setelah beberapa bulan ke depan itu pasti akan ada penambahan, minimal dua kali lipat untuk PHK yang ada di Indonesia. Yang saya tanyakan, uangnya ada enggak Pak buat bayar itu semua? Itu saja.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Kalau duitnya paling banyak Bu Dian aman pasti, kalau soal duit aman, ya.

Berikutnya kita ke Pak Nurhadi, bersiap-siap Pak, Handayani dan Pak Edy Wuryanto.

F-NASDEM (NURHADI, S.Pd.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX,
Direksi BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran, serta
Dewas BPJS Ketenagakerjaan.**

Dari saya, saya menyoroti kaitannya dengan kasus-kasus klaim peserta program jaminan sosial, sosial ketenagakerjaan khususnya di halaman 16, Pak Anggoro. Dijelaskan mengenai *service level agreement* penanganan pengaduan, saya ingin tau apakah memang membutuhkan waktu selama itu? Apakah tidak bisa dipercepat lagi prosesnya ya, jangan sampai kita ketularan seperti Pak Presiden Jokowi ini terheran-heran proses perizinan MotoGP di Mandalika kok begitu panjang prosesnya ya. Tolong dijelaskan bagaimana prosesnya secara detail, jadi kami bisa tau prosesnya menjadi lama karena alurnya atau karena hal lain, misalnya apakah karena kurangnya jumlah

petugas yang melayani pelayanan pengaduan seperti yang dijelaskan oleh Dewas ini dan ini juga saya mengalami sendiri Pak.

Pak Direktur, ini beberapa waktu yang lalu kami membantu salah satu masyarakat di kaitannya klaim JHT ya, karena prosesnya yang lama sekali. Perlu diketahui yang bersangkutan ini menggunakan aplikasi JMO, ketika minta bantuan kepada saya dan tim saya minta eskalasikan kepada kaitannya dengan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan ini baru langsung diproses dengan cepat Pak dan berhasil.

Nah maksud saya, apakah masyarakat ini harus mengadu dulu ke Komisi IX baru dipercepat? Ini kan menjadi ironi ketika semangat kita bersama-sama bagaimana kita mempermudah proses proses klaim ini dari berbagai macam jenis jaminan sosial tanpa mengadu ataupun curhat dulu ke Anggota DPR. Sehingga saya kira kalau sistemnya bisa disiapkan dan dengan baik dan dikoreksi dengan baik, *insyaAllah* ke depan tidak akan terjadi hal-hal demikian.

Seperti juga hal yang saya alami di dapil kami di Tulungagung ini Pak mohon dikoreksi juga, saya sudah tiga kali diklaim masyarakat kaitannya dengan JKM ini, ini *molor* sampai setengah tahun ya. Beberapa kali saya bantu prosesnya, nah ini mohon juga dievaluasi. Saya telepon pimpinannya kalau *enggak* salah namanya Pak Bisri, alasannya katanya kurang petugas, kurang petugas ya oke.

Terima kasih, itu Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Nurhadi.

Kemudian Pak Handayani, Pak Edy Wuryanto, dan nanti Pak Yahya. Silakan, Pak.

F-PKB (H. HANDAYANI, SKM., MPH.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullah warabarakatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan,
Rekan-rekan Anggota DPR RI Komisi IX,
Yang saya hormati Direktur Utama beserta jajarannya,
Yang saya hormati Dewas beserta keseluruhannya.**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa nanti tenaga honor itu akan tidak ada lagi pada tahun 2025, awal 2025. Kemarin waktu saya masih di Komisi II itu Menpan akan mengangkat 2,3 juta, tapi terakhir saya menerima informasi itu yang diangkat ada 1,7 juta orang, itu yang sudah masa tugasnya 5 tahun ke atas.

Nah ini masih ada yang 5 tahun ke atas tidak terangkat nantinya, nah apalagi yang belum sampai 5 tahun itu pasti jadi putus kerja dari pemerintah. Ada tidak terpikir, terbesat dari BPJS tenaga kerja ini mereka-mereka ini mau diapakan? Jangan kita di swasta disuruh ikut BPJS tenaga kerja segala macamnya, nah ini sekarang ini pemerintah sendiri, ada solusi atau tidak itu, untuk mengganti mereka-mereka yang putus kerja ini nantinya, apa pemutusan kerja mereka dari pemerintah nantinya.

Yang kedua adalah sesuai dengan kunjungan ke Balikpapan kemarin, itu di IKN itu BPJS tenaga kerja tidak bisa masuk itu, mereka dari Balikpapan itu ke sana *enggak* bisa masuk. Jadi bagaimana itu caranya pembinaan tenaga kerja sana, BPJS-nya apa sudah diikuti mereka di sana atau gimana caranya dari BPJS tenaga kerja pusat untuk masuk itu. Kalau memang sudah ada kira-kira berapa? Berapa orang sekarang yang bekerja di situ yang mendapat BPJS tenaga kerja ini. Mungkin demikian saja, Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Berikutnya Pak Edy Wuryanto, siap-siap Pak Yahya Zaini.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan, Anggota, Pak Dirut, dan Pak Dewas, seluruh jajaran yang saya hormati.

Poin saya yang pertama tentang JKP. Dewas di halaman 5, lalu kalau Pak Dirut di halaman 10. Kalau lihat data 2022, 2023, 2024, perbandingan klaim



JKP ini memang persentasenya terus meningkat. 2022 40%, kemudian naik 84%, lalu naik lagi 89%. Mudah-mudahan 2024 ini terus naik Pak, dijaga. Tren naik ini saya kira positiflah, karena JKP ini program baru.

Tapi kalau melihat data ini memang tidak semua pekerja yang mengalami PHK itu memperoleh manfaat JKP. Kalau saya hitung dari data itu di tahun 2022 ada 14.977 yang tidak memperoleh manfaat JKP dengan di PHK. Tahun 2023 ada 10.000, lalu 2024 ada 2.752. Nah ini pertanyaan saya, yang angka-angka ini itu ke mana JKP-nya, Pak? Kan ini angka banyak Pak perlu ditelusur itu ke mana ini? Harusnya kan 100%.

Saya menduga dari angka-angka itu tidak peserta yang *eligible*, itu pasti. Yang kedua, peserta JKP-nya itu dari peserta PKWT, kontraknya habis, PHK, sehingga *ndak* memperoleh JKP atau tidak mengetahui proses klaim JKP atau yang terakhir prosesnya *online*. *Online* ini kan kadang-kadang masyarakat kita tidak *awareness*, Pak.

Nah 4 penyebab ini menurut saya menjadikan angka-angka itu tadi selisih. Apapun itu menyangkut orang, Pak, jadi kalau di PHK hak mereka harus dipenuhi. Nah ini data-data ini mohon nanti ditanggapi, Pak. Kalau dia tidak menjadi peserta yang *eligible* itu bisa dipahami. Kalau menjadi peserta kemudian tidak memperoleh hak manfaat JKP ini yang dipertanyakan. Ini mohon data-datanya ini dirinci lagi Pak, diurai lagi, jangan sampai orang sudah menjadi peserta di PHK tidak memperoleh manfaat.

Yang kedua, pertanyaan saya hak mereka kan ada tiga itu, bantuan uang tunai maksimal 6 bulan, lalu pelatihan dan informasi pasar kerja. Ini juga berbarengan dengan PHK yang banyak di sektor tadi ada sektor tekstil dan produk tekstil. Nah sektor tekstil dan produk tekstil itu memang trennya sulit Pak bertahan Pak, karena orang akan bergeser ke informal. Orang sekarang ini sudah bikin pakaian sendiri, dijual sendiri *online* Pak, lebih efisien Pak, *enggak* bayar pabrik, *enggak* bayar karyawan, *enggak* bayar pajak, sehingga produksinya efisien, lalu harganya bisa bersaing dan trennya sekarang. Maka perusahaan-perusahaan garmen tutup itu bagian dari persaingan hidup di era sekarang.

Oleh karena itu, pekerja yang di sektor garmen kan butuh *re-skill* di luar garmen, butuh pelatihan baru, keterampilan baru. Sementara di manfaat JKP itu ada pelatihan-pelatihan baru untuk memberi keterampilan pada pekerja-pekerja seperti ini. Pertanyaan saya, apakah manfaat JKP ini bisa menasar ke situ, sehingga para pekerja memperoleh manfaat dan apa yang sudah dilakukan selama ini terhadap pemberian keterampilan baru pada sektor garmen, karena kebetulan datanya juga banyak di Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain-lain.

Yang ketiga, tadi Mbak Diah menyambung tadi JKK dan JKM. Ini tidak bisa diklaim karena ada dugaan proses pendaftaran menjadi peserta JKK dan

JKM itu tidak sesuai ketentuan. Kan tadi teleponnya Mbak Dian banyak berdering karena dapilnya ada di daerah-daerah industri, sementara seringkali JKK dan JKM itu investigasi dari BPJS Naker itu ketika peserta itu meninggal baru diketahui. Baru diketahui meninggal ternyata ditelusuri ada pendaftaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Mestinya pada saat pendaftar sudah diketahui Pak mestinya, sehingga pada saat meninggal tidak ada investigasi lagi, ini butuh proaktif memang.

Inilah yang menjadikan rakyat sering komplain, merasa dia menjadi peserta JKK, JKM, tapi begitu meninggal tau bahwa ada salah prosedur di dalam pendaftaran. Hal-hal seperti ini menjadi catatan penting itu bagi BPJS naker.

Yang terakhir, ya saya setuju dengan Bu Irma, memang Komisi IX ini urusannya pekerja Pak. Kalau data kepesertaan seperti yang disampaikan memang jauh, apalagi kami PDI Perjuangan itu ya soekarno Pak, urusannya papan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, itu hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Ini berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Jadi para calon-calon pilkada ini kalau jualan sektor kesejahteraan dari jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan itu dampaknya pada *electoral*, Pak. Jadi tepat sekali tadi kalau *campaign*-nya seperti ini.

Bahkan kemarin kami di Kaltim juga ada gubernur yang memberikan tantangan kepada daerah Rp100.000 kalau ada yang pekerja-pekerja informal atau golongan-golongan pekerja, pekerja-pekerja atau industri-industri yang tidak mampu dia ngasih *support* 100.000 bagi bupati, walikota yang ingin memberikan kontribusi juga. Harapannya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten itu bisa merangsang kontribusi pemerintah daerah di dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Naker, Pak.

Hal-hal seperti ini menjadi poin penting itu. Sehingga soal ini keterlibatan pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi sinergi dengan programnya BPJS Naker. Ini era-era pilkada seperti ini penting Pak itu menjadi apa semacam dorongan bagi pemerintah daerah atau komitmen bagi para bupati, walikota, gubernur agar memperhatikan sektor jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kesejahteraan hidup mereka di hari tua yang lebih baik.

Itu Pimpinan saya kira, karena teman-teman juga turun di pilkada jadi menurut saya ini penting, Pak. Kalau data ketenagakerjaan rendah, jualannya susah, Pak.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,



Pesannya lemes tapi isinya dalam nih. Makasih Pak Edy.

Berikutnya Pak Yahya Zaini, bersiap-siap Bu Nurhayati ya. Ya, silakan Pak Yahya.

F-GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan yang saya hormati,
Para Anggota Komisi IX,
Pak Dirut beserta jajaran,
Pak Kepala Dewas beserta Anggota.**

Pertama, waktu Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Tenaga Kerja, disitu disebutkan salah satu informasi bahwa ketahanan dana program JKK dan JKM itu mengalami penurunan. Saya mengusulkan pada waktu itu agar supaya PP yang terkait dengan JKM dan JKK itu direvisi dan disetujui oleh beliau dan menjadi keputusan rapat.

Selama ini memang kita tidak pernah mendengar Pak dari Pak Dirut maupun dari Pak Dewas tentang ketahanan dana ini, karena ini program jangka pendek beda dengan JHT ya kan program jangka panjang. Nah kami ingin mendapatkan informasi ini Pak, sejauh mana ketahanan dana untuk dua program ini kira-kira 5 tahun ke depan. Sebab kalau tidak, nanti ketahanan dananya menurun pesertanya juga tidak banyak bertambah sedangkan iurannya tidak mengalami peningkatan maka tentu akan mengalami penurunan juga pelayanan bagi masyarakat terutama peserta JKK dan JKM.

Memang iurannya itu sangat murah, lebih murah dari rokok satu bungkus, itu kalau saya sosialisasi itu perbandingannya rokok satu bungkus Pak Dirut ya, iya. Rokok satu bungkus berapa 25.000 Gudang Garam, bayar JKK, JKM berapa? 16.800. Kalau *benefit*-nya itu sangat besar sampai ratusan juta rupiah. 42 kalau meninggal biasa, 70 kalau meninggal karena kecelakaan.

Jadi kita agak intensif Pak Dirut melakukan sosialisasi, tapi tolong diperhatikan juga tentang masa depan dari ketahanan dana ini. Saya kira kami sudah mengusulkan kepada Ibu Menteri dan Bu Menteri setuju untuk mengusulkan kepada Presiden agar ada revisi tentang PP yang terkait dengan JKK, JKM, khususnya terkait dengan tarif iuran. Sebab kalau tidak ada penyesuaian kelihatannya agak berat ke depan, ini yang pertama saya kira ya. Kami tolong diberikan Gambaran, Pak iya kan.



Yang kedua, data dari Bapak tadi juga menyebutkan di halaman 4, ada 13.800 PHK yang terbesar di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah kalau ini melakukan klaim dalam waktu yang bersamaan, tentu sangat memberatkan ini pelayanannya, apalagi pengaduan layanan yang bersifat digital masih sangat terbatas. Tadi diakui oleh Pak Dewas tadi ya kan, masyarakat kita ini lebih percaya, lebih PD dan lebih apa ya merasa senang itu kalau datang langsung iya kan ke kantor-kantor cabang yang sifatnya fisik, sehingga layanan yang sifat digital ini kurang diminati ya kan di samping kendala-kendala teknologi yang dimiliki.

Nah bagaimana melayani 3.800 orang dalam waktu yang bersamaan ini? Kami tolong digaskan gambaran nih, Pak. Jangan sampai nanti seperti yang sampaikan teman-teman tadi, klaim-klaim JKK, JKM saja banyak yang nunggak ya kan. Ada Gus Nabil tadi menyampaikan eh Gus Nurhadi tadi menyampaikan 30 hari enggak selesai ini, ada yang tahunan ya Pak Nur ya dari dapilnya?

KETUA RAPAT:

Pak Yahya *kangen* sama Gus Nabil ya?

F-GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, S.H.):

Ya, agak mirip-mirip. Mirip segalanya Pak Ketua, bukan hanya mirip orangnya. Ya ini tolong diperhatikan Pak ya.

Untuk klaim-klaim itu kalau apa namanya klaim PHK Pak ya JHT, JKP itu berapa lama itu biasanya, Pak? Ya kan, jangan sampai orang yang sudah kena PHK ya kan secara psikologis mengalami masalah ya kan untuk mendapatkan apa klaim juga menunggunya lama, sehingga mereka mengalami kesulitan. Jangan sampai juga ini ya kan jatuh menjadi miskin karena keterlambatan apa klaim daripada JHT atau JKP-nya ya, ini yang-yang kedua.

Nah yang ketiga kepesertaan PMI. Kalau kita lihat data yang sampaikan tadi itu baru 10% mungkin kurang Pak ya dari jumlah orang yang bekerja di luar negeri, jadi potensinya sangat besar ini. Memang salah satu kendalanya banyak yang *undocumented*, tapi yang bekerja di luar negeri ini kan tidak mudah untuk dilayani. Sementara perwakilan dari BPJS tenaga kerja di luar negeri sangat sedikit. Nah terobosan apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk menjangkau kepesertaan apa namanya PMI yang ada di luar negeri itu menjadi meningkat? Karena ceruk pasarnya sangat besar ini Pak ada yang mengatakan 5 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, ada yang mengan mengatakan 10 juta ya kan, sementara layanan yang diberikan oleh apa BPJS Ketenagakerjaan masih sangat terbatas.

Nah yang terkait dengan masalah ini, apakah ada keberlanjutan kepesertaan dari PMI setelah pulang ke Indonesia? Apa hanya selama bekerja di luar negeri saja menjadi peserta, tapi setelah pulang ke Indonesia dia putus kepesertaannya? Nah ini tolong dikasih gambaran, karena BP2MI itu mempunyai program Pak ya kan, purna ya kan, program purna pembinaan terhadap pekerja PMI yang bekerja di luar negeri setelah pulang ke Indonesia dibina kegiatan usahanya. Nah ini tolong di apa namanya di-dicek juga ya kan apakah setelah pulang ke Indonesia juga masih berlanjut apa kepesertaan BPJS ketenagakerjaannya.

Nah selanjutnya ini di luar topik ini, Pak ya, ada dua pertanyaan saya. Saya ingin mendapatkan informasi mengenai implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021, bisa digambarkan *enggak* kira-kira untuk daerah terutama karena kami ini kan sering berkunjung ke daerah baik kunjungan spesifik maupun kunjungan reses. Ya banyak informasi-informasi yang kita dapatkan. Kira-kira bisa diberikan gambaran tidak 10 Pemda terbaik ya kan dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 ya kan.

Kami kemarin ke dengan Pak Dewas ke Kaltim Pak, cukup lumayan bagus Pak *coverage*-nya 70% ya kan dari 1,3 juta ada 900.000 yang di-*cover* oleh BPJS, itu pekerja-pekerja yang ada di Kaltim. Untuk sektor apa namanya rentannya itu dari 500 ada 100.000, dari 500.000 100.000 dan masih bergerak terus di sana, jadi karena usaha bagus ya kan. Nah terhadap daerah-daerah yang bisa melaksanakan program BP Jamsostek dengan bagus ini selama ini dikasih *reward* apa Pak oleh BP Jamsostek ini? jadi harus ada *reward*-nya juga Pak supaya ada insentif ya kan bagi mereka.

Nah jadi saya belum melihat ini ada-ada pendekatan khusus dari BP Jamsostek kepada pemda-pemda yang berhasil ya kan, apalagi Kaltim ini bisa mencapai *universal coverage* ini Pak ya kan kalau bisa dilanjutkan dengan baik ini.

Nah temuan lain juga di Kaltim kemarin dan ini saya kira juga perlu dicek di tempat lain, karena pemerintahan Pak Jokowi ini kan banyak membuat proyek-proyek strategis nasional. Nah temuan kita kemarin di Kaltim, pekerja yang bekerja di sektor proyek strategis nasional ini kepesertaannya tidak terjamin Pak, karena *basecamp*-nya tidak di daerah, subkon-subkonnya itu sebagian besar ada di pusat ya kan, sehingga mereka rugi ini pesertanya tidak ter-*cover* oleh BP Jamsostek atau kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, ini temuan kita, Pak. Jadi kalau ini bisa dilakukan di pusat karena kantor pusatnya kan ada di Jakarta ini. Jadi BP Jamsostek pusat yang melakukan pendekatan kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja atau menjadi subkon atau menjadi kontraktor di berbagai proyek strategis nasional, karena puluhan proyek strategis nasional yang ada di Indonesia. Kami baru menemukan kemarin satu aja di Kalimantan Timur yaitu, proyek strategis Pertamina. Jadi

mereka mengeluhkan karena tidak bisa dijangkau oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Balikpapan maupun apa kantor wilayah Kalimantan Timur.

Jadi kalau ini bisa dijangkau saya kira jumlahnya cukup-cukup besar juga, apalagi proyek strategis nasional ini menjadi apa namanya ikon Pak Jokowi. Untuk DKI Jakarta saja yang akan dilakukan itu dua di Kapuk dan di BSD kalau tidak salah dalam waktu dekat ya. Saya kira itu Pimpinan beberapa catatan saya, mudah-mudahan bisa mendapatkan respon yang baik dari Pak Dirut maupun Pak Dewas.

*Billahi taufiq walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam,

Terima kasih.

Berikutnya Bu Neng, Bu Nurhayati.

F-PPP (Hj. NURHAYATI):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya nanti saya peringatkan bahwa, nanti ini kita jam 11.30 *sorry* 12.30 kita rehat ya siap nanti sambil menunggu jawaban dari mitra, silakan.

F-PPP (Hj. NURHAYATI):

Ya, terima kasih Pimpinan.

Selamat siang kepada semua mitra yang hadir hari ini. Saya hanya ingin mengingatkan saja Pimpinan bahwa, data atau materi yang diberikan oleh hari ini oleh Dewas maupun oleh BPJS Tenaga Kerja itu sangat *mepet* sekali gitu. Jadi saya rasa teman-teman juga untuk evaluasi hari ini itu membaca datanya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kami menerima tadi dari Dewas pukul 04.30 pagi dan dari BPJS tenaga kerja juga pukul 06.00 pagi gitu.

Jadi ini adalah satu catatan Pimpinan, karena sesuai tata tertib harusnya 3 hari atau paling lambat 1 hari sebelumnya diberikan. Mungkin catatan untuk BPJS. Terima kasih.

Kami tadi sudah dengar dari kawan-kawan semua bahwa, ada banyak regulasi dan kasus mungkin ya yang kita alami atau kita hadapi dari para



pekerja ini. Kalau kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, mengatur dan melindungi penggunaan data dan informasi penting para pengguna, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa undang-undang tersebut berhubungan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang perubahan Pasal 34 Ayat (2) yang berbunyi “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Perlindungan tersebut diberikan kepada pekerja untuk memberikan rasa aman dan nyaman tentunya dalam pekerjaan.

Nah yang ingin saya tanyakan, apakah benar adanya klaim peretasan dari Anggota Bridge Forum yang memposting tentang pelanggaran data signifikan yang melibatkan BPJS Ketenagakerjaan? Karena di dalam unggahan tersebut kita melihat disertakan dokumentasi data BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diunduh. Dan kita melihat bahwa informasi yang diunggah *hacker* berhasil membobol data yang mencakup nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, kelompok umur, alamat, kode pos, provinsi, dan lain-lainnya. Jadi data pribadi seseorang ini sudah diretas di BPJS Ketenagakerjaan, apakah ini betul gitu loh karena ini ada dalam unggahan *hacker*-nya gitu.

Dan tentunya ini sangat berbahaya karena bisa diperjual belikan data itu terutama sekarang banyak sekali pinjaman *online*, judi *online* begitu ya, jadi orang tiba-tiba menerima tagihan gitu. Nah ini adalah yang harus kita lindungi dari data-data pribadi.

Kita tau bahwa, pusat data nasional kita sudah diretas, kalau kita masuk imigrasi semuanya manual sekarang ini gitu. Jadi karena imigrasi ternyata tidak punya *backup* yang bisa di-digunakan. Dan tentunya saya juga ingin jawaban dari BPJS Tenaga Kerja, apakah betul BPJS Tenaga Kerja ini sudah diretas begitu sesuai dengan unggahan yang ada oleh *hacker*-nya ini dari Bridge Forum. Dan kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan diberikan ranah untuk melakukan jaminan tenaga kerja yang memiliki beberapa program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Kalau kita melihat dari paparannya Dewas ini ada *yield* optimalisasi, ya Pak ya, di sini ada *smart investment system*. Nah kasus yang pernah ditelisik oleh Kejaksaan mengenai pengalokasian dana iuran BPJS Ketenagakerjaan, mengindikasikan bahwa perlunya BPJS Ketenagakerjaan transparan mengenai dana iuran ini gitu, diinvestasikan ke mana saja dan besarnya, serta hasilnya disampaikan ke publik secara transparan. Karena ini adalah dana masyarakat

yang mana dia menjamin apabila orang kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, hari tua, dan lain-lain.

Nah ini adalah yang harus disampaikan kepada publik secara transparan dan berapa *margin* yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga bisa menghitung. Karena sekarang ini banyak komplain, bahwa jaminan hari tua itu tidak mencukupi kebutuhan pekerja begitu dan keluarganya. Nah mungkin ini juga bisa dihitung dari margin yang diterima oleh BPJS Tenaga Kerja untuk para pekerja yang memang membayar iuran untuk hari tua. Tentunya kalau untuk hari tua kan panjang waktunya Pak dalam pembayaran begitu.

Dan kalau kita melihat Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, banyak kasus yang tadi juga disampaikan oleh Pak Nurhadi bahwa, bisa 6 bulan, nah padahal JHT ini yang dimaksud pada Ayat (1) dilakukan paling lama 5 hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini mungkin kita ingin tau gitu, karena yang dikeluhkan klaim JHT ini yang lama sampai 6 bulan, 1 bulan gitu, katanya ada yang terkendala verifikasi, wawancara dan lain-lain yang prosesnya lama sehingga menyulitkan mereka yang ingin mencairkan dana JHT nih.

Nah ini yang kita inginkan adalah wawancara seperti apa gitu Pak. Karena kan sudah jelas dia sudah membayar iurannya sekian lama pada saat hari tua dia mau mencairkan, nah wawancaranya ini apa lagi? Kalau verifikasi mungkin perlu dilakukan takutnya kan bukan orangnya begitu ya, tetapi kalau wawancara mungkin yang dianggap ini adalah kendala gitu ya yang anggap jadinya lama begitu, Pak. Jadi wawancara seperti apa sih yang dilakukan oleh BPJS untuk bisa memberikan apa jaminan hari tua itu cair begitu, Pak.

Dan kita lihat bahwa, kalau dari Instagram BPJS Ketenagakerjaan mungkin Bapak juga sudah baca, kita lihat bahwa banyak sekali komentar 11.000 komentar dan mayoritas komentarnya mengeluhkan lamanya proses verifikasi tersebut dan wawancara, sehingga klaim pencairan itu cukup lama. Tadi jadi tidak heran kalau sampai 6 bulan, tetapi kalau 6 bulan itu rasa-rasanya sangat lama ya, Pak ya. Verifikasi seperti apa sih yang dibutuhkan dan wawancara seperti apa. Dan yang kita lihat bahwa dari PHK mungkin dari Januari hingga 19 Juni 2024 terdapat mencapai 27.793 orang dan ini adalah gabungan ya Pak ya dari sektor industri tekstil, garmen dan *footwear*.

Dan sekarang juga kalau kita lihat bahwa, Tokopedia dan TikTok shop juga mulai mem-PHK para pegawainya dan ini lagi tentunya menjadi salah satu masalah lagi gitu di apa di dalam ketenagakerjaan kita. Belum lagi banyak juga perbankan sekarang juga mulai melakukan PHK, jadi banyak bank juga yang tutup dan atau mengurangi pekerjanya begitu. Dan tentunya isu ini sangat penting dan mendesak mengingat dampak sosial dan ekonomi yang besar terhadap para pekerja yang terkena PHK. Apalagi kalau kayak kita lihat tadi yang Bu Irma sampaikan bahwa kepesertaan aktif yang memang tinggi 98%

tetapi kepesertaannya hanya 40%. Nah yang di di DKI Jakarta saya lihat hanya 2,48%, nah ini tuh 2,40% dari 600 sekian perusahaan yang mendaftarkan begitu ya Pak ya? Yang 2,48 ini ya? Jadi ada 600 sekian perusahaan dan kepesertaannya itu hanya 2,48% DKI Jakarta.

Artinya, banyak perusahaan di Jakarta ini yang tidak mendaftarkan BPJS tenaga kerja bagi para pegawainya ya. Padahal Jakarta ini tentunya kita ketahui bahwa kantor itu banyak sekali gedung-gedung tinggi, perusahaan-perusahaan besar itu adanya di Jakarta ini kantornya sebagai kantor pusatnya, tetapi kenapa BPJS ketenagakerjaan ini sangat rendah begitu. Kalau misalkan Bapak bilang di sini sudah melakukan komunikasi begitu ya dengan beberapa Perusahaan, nah ini perusahaan di mana saja apakah di Jakarta juga termasuknya? Karena pekerja itu kan harus dilindungi di seluruh Indonesia Pak, jadi bukan berarti di Jakarta karena dia bekerja di perusahaan-perusahaan raksasa begitu ya.

Kita tau miliuner atau triliuner itu adanya di Jakarta ini begitu, perusahaan-perusahaan besar adanya di Jakarta, mungkin miring dikit adanya di Banten gitu ya, di Bekasi. Nah ini adalah salah satu yang ingin kita ingin tau kenapa bisa serendah itu begitu Pak dan evaluasi atau pengawasan dari BPJS tenaga kerja itu seperti apa?

Yang kita ingin lihat juga bahwa, bagaimana cara BPJS tenaga kerja ini untuk mencapai para perusahaan-perusahaan ini gitu mau mendaftarkan pegawainya. Artinya kalau kita lihat bahwa, kebijakan dan regulasi yang harus kita cermati itu belum efektif gitu implementasinya. Kebijakan yang memang sudah ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan peran pelaksanaan lainnya, tapi implementasi kebijakan ini belum efektif kalau saya lihat. Apalagi banyaknya pekerja juga yang belum diberikan hak-haknya dari perusahaan-perusahaan. Jadi dari perusahaannya tidak diberikan haknya, dari BPJS tenaga kerja juga dia tidak mendapatkan karena dia tidak didaftarkan, tentunya ini sangat merugikan buruh di lapangan.

Dan kami juga menginginkan bahwa, implementasi di lapangan atau akses dan klaim jaminan sosial juga ini disederhanakan prosedur klaim dan mempercepat agar mempercepat waktu pemrosesan. Jadi kalau misalkan perlu verifikasi, verifikasi itu kan sebetulnya mudah aja Pak, biasanya kalau bank itu kan ditanya nomor telepon, nomor NIK atau nama ibu kandung begitu kan, lalu pin gitu, nah itu sudah bisa terverifikasi. Jadi kalau misalkan sampai berbulan-bulan verifikasinya nih mungkin harus ditinjau ulang bagaimana sih prosedurnya ini begitu dan besaran dan cakupan jaminan sosial yang tadi saya katakan bahwa, masih banyak yang mengeluh belum mencukupi kebutuhan dasar mereka dan keluarganya untuk hari tuanya.

Dan sosialisasi dan edukasi hak pekerja juga ini harus aktif gitu ya, harus dimaksimalkan. Bisa saja melalui media termasuk media sosial, kampanye

publik dan bekerja sama dengan serikat pekerja atau perusahaan untuk masyra, para tenaga kerja ini mengetahui bagaimana sih prosedur klaim dan hak-hak apa saja yang mereka miliki sebagai pekerja. Jadi ini harus aktif Pak, mungkin flyer-flyer. Di media sosial tuh sebetulnya lebih apa lebih mudah bisa masuk TikTok, Instagram seperti iklan begitu ya tapi adalah itu sebagai edukasi kepada para pekerja bahwa mereka mempunyai hak apa saja sebagai pekerja.

Dan kapasitas dan kualitas layanan di daerah terpencil juga kami cermati. Dikarenakan letak atau ada kendala geografis yang dihadapi oleh pekerja di daerah terpencil, maka mereka kesulitan dalam mengakses layanan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalkan *online* mungkin apa internetnya yang tidak ada atau tidak baik, tetapi kalau misalkan dia harus ke kantor BPJS juga mungkin cabangnya jauh gitu dari daerahnya, sehingga memerlukan waktu berapa jam. Nah ini juga salah satu kendala, bagaimana BPJS itu mempunyai pelayanan mungkin di kelurahan atau di desa-desa begitu, Pak.

Setidaknya bisa mengedukasi salah satu ASN di sana atau pekerja di sana untuk bisa melayani jawaban-jawaban atau diberikan laptop yang mereka juga bisa *input* data mungkin begitu. Jadi itu juga salah satu salah pelayanan yang bisa dilakukan oleh BPJS. Jadi tidak harus seluruhnya karyawan BPJS, tetapi bisa juga bekerja sama dengan para desa, Kades ataupun Lurah begitu.

Jadi kalau tadi kita teman-teman juga mengevaluasi terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang capaian target peserta PMI begitu ya pada tahun 2024 kepesertaan aktif PMI sebanyak 592.000 sekian, Pak. Jadi yang kalau kita lihat bahwa banyak PMI juga tidak mengetahui nih Pak tentang program jaminan sosial yang tersedia untuk mereka. Jadi mereka melihat, oh kalau kerja di Indonesia mereka harus mempunyai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tapi kalau PMI dianggapnya mungkin tidak perlu begitu dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan atau agen-agen juga tidak memberitahu hak-hak ini, jadi mereka itu tidak tau.

Jadi saya merasa perlunya sosialisasi program jaminan sosial bagi PMI. Jadi kalau ada agen-agen yang memang melatih akan memberangkatkan PMI sebaiknya BPJS tenaga kerja itu melakukan sosialisasi di sana begitu. Nah bisa apakah bisa melalui Zoom ataukah bisa melalui tadi berita-berita media-media sosial atau media yang memang mereka harus bisa mengetahui apa hak mereka sebagai PMI.

Dan juga kemudahan pendaftaran dan pembayaran. Jadi mereka kalau sudah di luar negeri mungkin Pak agak susah ini untuk membayar, nah ini seperti apa gitu, jadi bisa sistemnya yang harus disederhanakan. Jadi penyederhanaan proses pendaftaran pembayaran jaminan sosial bagi PMI bisa bekerja sama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri, KBRI dan KJRI mungkin Pak bisa diberikan posko untuk mereka bisa membayar BPJS Ketenagakerjaan ini.

Dan kami menginginkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih maksimal, lebih efektif lagi. Karena kalau kami melihat banyaknya perusahaan tidak mau membayar itu dikarenakan penegakan hukumnya atau pengawasan yang sangat rendah gitu sangat tidak maksimal *nih*. Jadi kami menginginkan bahwa ini untuk perusahaan-perusahaan yang tidak membayar jaminan sosial ketenagakerjaan ini, mendapatkan penegakan hukum dan sanksi yang tegas tentunya dari BPJS ketenagakerjaan.

Nah ini kami menginginkan ke depannya Pak seluruh tenaga kerja itu bisa terlindungi gitu, karena perusahaan-perusahaan juga banyak yang tidak memberikan hak apabila mereka kehilangan pekerjaan. Apalagi sekarang banyak *outsourcing*, banyak juga yang perjanjian kerja waktu tertentu begitu ya.

Nah ini mereka ini belum tau apakah mereka itu berhak tidak sih mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka. Nah ini aturannya harus jelas Pak, jadi harus dijelaskan bahwa seluruh tenaga kerja di Indonesia itu mempunyai hak untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan oleh pemberi kerja begitu. Nah ini juga harus jelas Pak, apakah misalkan pekerja-pekerja kita di rumah, Pak.

KETUA RAPAT:

Bisa dipersingkat, Bu.

F-PPP (Hj. NURHAYATI):

Iya, di rumah misalkan Pak, supir atau apa ART itu apakah perlu juga majikan-majikannya mendaftarkan mereka mempunyai BPJS Ketenagakerjaan

Nah mungkin sekian dari kami.

*Wabillahi taufiq walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam,

Ini saya usulkan ya, habis Bu Nini kita bisa lanjut tapi karena ini ada rapat lagi jam 2, jadi saya usulkan habis Bu Nini ini kita skor sebentar kemudian kita makan siang langsung masuk dengan jawaban langsung masuk kesimpulan ya.

Silakan Bu Nini.



F-PKB (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Langsung saja Pak, soal PMI ini menarik kemarin kan juga kita sudah diskusi juga dengan Pak Jay yang waktu itu mewakili Pak Dirut. Waktu itu dengan kita diskusi di apa Pak Edy itu timwas PMI, Pekerja Migran Indonesia. Jadi memang salah satu yang perlu kita lakukan sama seperti usulan dari Dewas tadi soal terbatasnya kanal-kanal fisik. Jadi memang yang kemarin disampaikan kurang bagaimana-bagaimana *support* dari Kementerian Luar Negeri untuk *membikin* kanal secara fisik itu ya, Pak Anggoro ya.

Nah ini yang perlu kita dorong Pak-Pak Ketua, Pak Melki, bagaimana ini urusan PMI ini komunikasinya tidak hanya dengan Kementerian Ketenagakerjaan saja tapi juga Kementerian-Kementerian terkait. Karena memang selama ini kan BPJS tenaga kerja ya alurnya dengan Kementerian, BPJS tenaga kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan dengan Kementerian Luar Negeri. Ini yang perlu kita dorong juga agar diberikan ruang yang seluas-luasnya di apa di KBRI-KBRI kita agar bisa membuka kanal fisik, sehingga komunikasi dengan PMI kita lebih cepat dan ini untuk daerah-daerah atau negara-negara yang PMI-nya cukup banyak. Ini seperti kayak Saudi, Hongkong, Malaysia, Korea, Taiwan, itu kan PMI kita cukup banyak.

Nah yang kedua adalah soal awak kapal. Ini memang kemarin juga jadi diskusi kita. Kemarin Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kita rapat di timwas PMI salah satunya kita mengundang dari Kementerian Perhubungan dan mereka bilang bahwa, itu adalah awak kapal tuh bagian dari Kementerian Perhubungan, bukan bagian dari PMI. Waktu itu kita menjawabnya, "Wah kita Komisi IX senang-senang saja itu kalau bukan bagian dari PMI, berarti kan tanggung jawab kita berkurang". Tapi masalahnya mereka ketika ada soal pasti lapornya ke Komisi IX, lapornya ke Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI. Nah ini yang yang bisa mungkin Pak Ketua nanti bisa kita dorong salah satunya mungkin kesimpulannya bagaimana berkoordinasi dengan Kemenko. Karena ini kaitannya dengan antar Kementerian berarti kan dengan Menkonya, Kemenkonya yang bisa menyelesaikan ini.

Terakhir soal pilkada. Saya sepakat dengan Bu Irma, ini perlu di data, perlu pendekatan khusus kepada calon-calonnya. Karena contoh ketika Pileg kemarin kan kita banyak teman-teman termasuk saya ini mendaftarkan tim kita untuk di BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan untuk masa kampanye lumayan kan kalau sebulan 2 bulan kalau ada 2.000 orang, 2000 kali 16.800 itu sudah berapa, itu yang pertama.

Jadi di samping itu juga kemarin apa kita dorong juga untuk berkomunikasi secara intens Pak dengan Komisi II bagaimana KPU, Bawaslu seperti harus diperlakukan seperti ketika Pemilu kemarin. Karena

negara kita ini negara negara yang berkepulauan yang tidak semuanya gampang diakses, sehingga ini pilkada ini seluruh Indonesia ini ya kayak Pemilu kayak Pileg, Pilpres kedua saja kan sebenarnya, karena seluruhnya-seluruhnya melaksanakan kan pilkada.

Jadi bagaimana apa petugas-petugas di KPPS mulai tingkat KPPS ini juga bisa mendapatkan cover dari BPJS ketenagakerjaan. Nah ini butuh komunikasi. Jadi saya sepakat dengan Bu Irma dan teman-teman yang lain lagi, teman-teman yang lain bagaimana sebenarnya yang butuh didorong adalah membangun jaringan yang lebih luas lagi untuk bisa dengan kementerian dan lembaga terkait agar nantinya kepesertaan ini bukan hanya fokus kepada perusahaan saja, tapi juga ke wilayah-wilayah lainnya.

Demikian Pak, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bu Nini.

Saya kira kita bisa istirahat sebentar dulu sebelum nanti apa lanjut. Kita istirahat sampai jam 01.30 ya atau 01.15? 01.15 ya, setengah jam ya saya skors.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.39 WIB)

KETUA RAPAT (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Baik.

Bapak Ibu sekalian.

Kita mulai, saya buka skors ya, skors saya cabut.

**(SKORS DICABUT DAN RAPAT
DIBUKA KEMBALI PUKUL 13.21 WIB)**

Baik.

Bapak Ibu sekalian.

Setelah tadi kita melaksanakan skors 30 menit ini mau 45 menit kita langsung mendengarkan jawaban dari Dirut BPJS Ketenagakerjaan dan nanti dari Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Jawabannya disampaikan singkat, padat, jelas, nanti apabila ada perlu jawaban yang bersifat lebih detail merespons



semua pertanyaan disiapkan tertulis aja, biar nanti kita bisa efektif, efisien dalam merespon semua pertanyaan.

Kepada Pak Anggoro Dirut BPJS Ketenagakerjaan kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim,

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Anggota Komisi IX,

Izinkan kami merespon. Pertama-tama terima kasih Pimpinan dan Bapak, Ibu sekalian atas harapannya tadi, tantangan-tantangan dan juga *challenge*-nya untuk bekerja lebih cerdas lagi. Kita tentu saja selama ini pencapaian kita tidak terlepas dari dukungan Bapak dan Ibu Komisi IX saat-saat sosialisasi yang juga banyak membantu mengedukasi.

Saya mungkin nanti juga akan merespon langsung supaya lebih singkat dari, dari Ibu Irma, dari Bu Elva, dari Ibu Dian, dari Pak Nurhadi, Pak Handayani, Pak Edy, Pak Yahya Zaini, Pak, Ibu Nurhayati, dan juga Bu Ninik tadi yang terakhir.

Pertama saya menyampaikan klarifikasi sedikit tadi yang dimaksud dengan pencapaian persentase yang sebenarnya Bu Irma dan juga Ibu Nurhayati tadi itu di *slide* 6 itu adalah persentase dari total komposisi pekerja di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki. Jadi di sektor itu yang jumlahnya tadi 6.900 sekian perusahaan bisa dibantu *slide*-nya, kalau kita *breakdown* lebih dalam dimana sajakah para pekerjanya berada memang terbesar adalah di Jabar tentu saja dan Jawa Tengah, karena kita tahu sektor ini sektor pada karya dan mencari uang upah yang cukup kompetitif maka ada di sana.

Kalau tadi Ibu Nurhayati sampaikan kenapa kok Jakarta hanya 2%, memang kami di Jakarta untuk sektor tersebut tidak berada di Jakarta. Nah ini *slide* ini sedikit klarifikasi saja mungkin karena cara kami menyampaikan sehingga interpretasinya menjadi kurang pas.

Jadi tadi Jawa Barat 40% itu 40% dari total 1,5 juta peserta aktif di sektor industri garmen, tekstur, dan alas kaki. Pekerja ini 1,5 juta, 500.000 pesertanya ada di Jawa Barat, lalu 500.000 ada di Jawa Tengah, dan di DKI Jakarta itu 37.000, karena memang pabrik-pabrik tidak ada di Jakarta adanya di luar Jakarta, sehingga komposisi jadi seperti ini. Jadi mungkin nanti depan kami

akan lengkapi datanya komposisi pekerja di seluruh provinsi total pekerja lalu kita akan masuk *zoom in* kepada industri garmen, tekstur, dan *footware*.

Bu Nurhayati tadi sedikit menyampaikan Bu tadi yang Ibu *challenge* mengenai DKI Jakarta itu adalah persentase pekerja tekstil, garmen, dan *footware* yang ada di Jakarta. Jadi memang sebarannya ada di luar Jakarta memang khusus untuk pekerja garmen, tekstil, dan *footware*. Jadi.

F-PPP (Hj. NURHAYATI):

Izin Pimpinan. Mungkin ingin bertanya dikit aja.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PPP (Hj. NURHAYATI):

Artinya yang diwajibkan menjadi BPJS peserta Ketenagakerjaan ini, ini targetnya adalah industri ya Pak ya? targetnya hanya buruh-buruh begitu? Kalau bagaimana dengan pekerja-pekerja formal di kantor gitu Pak dan informalnya?

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Iya.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Karena kita tadi memulainya dengan isu PHK di industri tekstil, garmen, dan alas kaki sehingga kami pada saat menyampaikan *slide* ini kami fokus kepada industri tersebut. Tapi kalau target kita semua pekerja Bu, semua pekerja formal informal kecuali TNI, Polri, dan ASN. Nah pekerja yang kita bahas industri tekstil, garmen, dan alas kaki ini memang pabrik-pabriknya memang tersebar di Jawa Barat dan Jawa Tengah Bu. Sehingga kalau tadi kita lihat Jawa Barat kenapa 40% dari 1,5 juta karena memang pabrik-pabrik dari Jawa Barat, dan sekarang trennya juga mulai banyak pindah ke Jawa Tengah karena upahnya lebih rendah.

Nah DKI tadi yang Ibu sampaikan 2,48% karena memang domisilinya para pekerja itu kebanyakan ada di daerah-daerah industri. Sehingga kalau Ibu

sampaikan di DKI kecil khusus untuk garmen, tekstil, alas kaki memang kecil. Tetapi kalau nanti kita lihat industri yang lain contoh industri teknologi dari *e-commerce* Jakarta masih banyak karena dia domisili Jakarta. Jadi itu Bu sedikit penjelasan.

Tapi betul Bu bahwa potensi yang juga besar adalah pekerja-pekerja informal. Tadi Ibu sampaikan bagaimana dengan ART dan supir gitu. Itu termasuk pekerja di rumah tangga yang kita sebut program sertakan, jadi kita mengajak para pekerja untuk melindungi pekerja sekitar mereka. Jadi tidak hanya supir, ART tapi juga sekitar kita Bu apakah itu petugas kebersihan, lalu petugas *security* di sekitar rumah, nah itu yang kita dorong untuk bisa dilindungi.

Lalu tadi juga *challenge* bagaimana dengan PHK menurun apa strategi kita? Kami memang dengan situasi saat ini untuk sektor-sektor yang industrinya turun, kita harus mengganjalnya juga dengan potensi yang lain. Kita melihat ada ekosistem desa. Di desa banyak sekali para pekerja di desa dan juga kita melihat banyak mitra-mitra desa yang juga mempekerjakan banyak karyawan.

Lalu habis itu pasar, di pasar juga banyak sekali pedagang-pedagang pasar yang belum jadi peserta. Pedagang pasarnya mungkin mendaftar sebagai bukan penerima upah tetapi pegawai dari pedagang tersebut bisa menjadi pekerja penerima upah dari pedagang pasar. Itu yang kita lihat potensinya.

Lalu yang juga besar potensinya tidak hanya industri tekstil tetapi juga usaha mikro kecil. Kalau perusahaan besar menengah rata-rata sudah mendaftarkan pekerjaannya. Tetapi yang menjadi tantangan kami adalah pekerjaan mikro kecil yang selama ini memang sudah berjalan tetapi mereka belum melindungi karyawannya. Meskipun 2 atau 3 orang kami rasa ini potensi yang besar karena kalau kita UMKM jumlahnya juga puluhan juta.

Itu yang kita lihat sebagai strategi, jadi strategi untuk menghadapi situasi seperti ini kita harus menambahkan peserta tidak hanya sektor formal tetapi juga informal. Namun kalau sektor formal kita juga mesti masuk segmen-segmen mikro dan kecil yang potensinya masih sangat besar.

Kedua tadi mengenai juga mengenai selisih klaim tadi ditanyakan juga antara klaim JKP dengan jumlah klaim yang dibayarkan. Memang betul Pak tadi semakin tahun semakin kecil tahun pertama selisihnya 10.000, tahun kedua 10.000, tahun ketiga 2.000 itu satu, lebih kepada edukasi yang semakin baik sehingga orang yang terkena PHK sudah 99% sekarang, 90% sekarang yang sudah dapat JKP. Kemana yang sekitar 10%-an? itu memang tidak *eligible* karena suatu saat JKP-nya adalah dia juga peserta JKN. Karena dia bukan peserta JKN maka dia tidak *eligible*. Atau yang juga besar porsinya adalah peserta yang belum setahun mengiur, karena salah satu persyaratan

JKP adalah sudah mengiur 1 tahun. Dan yang terakhir yang juga porsinya sampai melihat masih cukup, cukup signifikan adalah klaimnya telat lebih dari 3 bulan.

Nah di poin yang terakhir ini lah yang kita dorong bersama-sama dengan wasnaker setempat untuk selalu mengedukasi perusahaan-perusahaan agar mereka memastikan kalau karyawannya keluar jangan terlambat untuk mengklaim JKP. Nah ini tadi datanya. Tapi poin dari *slide* ini adalah kita ingin menunjukkan bahwa edukasi JKP memang jadi kata kunci agar apa? Agar persentase yang dibawa 40%, 84%, dan 89%nya terus meningkat.

Berikutnya lagi bagaimana kita strategi untuk secara masif kepada pilkada. Betul sekali Bapak Ibu Pimpinan dan tadi dari Ibu Irma juga dan tadi dari beberapa Anggota Komisi IX. Pengalaman dari Pilpres kemarin dari 7 juta anggota atau petugas KPU itu yang terdaftar baru 1,3 juta. Itu pun dikarenakan salah satunya padahal KPU sudah memberikan surat apa edaran untuk mereka mendaftar, tentu kata kuncinya adalah apakah pemerintah daerah setempat mendaftarkan atau tidak.

Jadi kita bersama dengan cabang-cabang mendorong pemerintah daerah setempat untuk mendaftarkan para petugas KPU. Tanggal 13 sore surat dari kementerian ketenagakerjaan dengan Kemendagri keluar lalu hari itu juga sebagian besar juga terdaftar dari 7 juta 1,3 daftar dan banyak juga dari mereka yang di hari pertama bekerja sudah klaim gitu salah satunya kemarin kita berikan santunan. Jadi tanggal 13 sore mendaftar tanggal 14 malam meninggal dunia itu dapat beasiswa 2 anak-anak juga. Jadi kalau kita lihat kemarin yang terdaftar 1,3 juta dan yang klaim yang lalu ada 44 petugas dengan nilai klaim 2,5 miliar.

Untuk pilkada memang kami juga sudah jauh-jauh hari mempersiapkan KPU dan juga Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat untuk menggarap atau memastikan 7 juta petugas yang di pilkada bisa ikut. Dan tantangan tadi betul seperti Ibu Irma sampaikan nanti biasanya ya hanya akan *stay* 30% sehingga kita mesti ekstra *effort* untuk yang selebihnya bisa bertahan. Karena itu potensi yang besar dan tentu saja mereka sudah menjadi peserta harusnya mereka sudah bisa lebih mengerti tentang program.

Tadi juga sempat ditanyakan bagaimana dengan fluktuasi JKP yang oleh Bu Eva tadi. Fluktuasinya lebih kepada karena kita melihat dari besarnya PHK atau turun naik PHK memang itu di luar kontrol kita tapi yang bisa kita pastikan adalah bahwa rasio tadi yang sudah 80% 90% harus tetap terjaga. Artinya apa? setiap ada PHK harus kita pastikan bahwa peserta tahu mereka punya hak terhadap JKP.

Lalu tadi juga *concern* mengenai IKN dari Pak Handayani IKN, di IKN semua pekerjaan di IKN semua sudah terlindungi Pak kurang lebih 30.000 pekerja di sana. Dan karena kami sekarang dalam proses untuk membuka

cabang sehingga kita sekarang menempatkan mobil layanan gerak Pak ada mobil yang BPJS ketenagakerjaan yang biasanya berhentinya di hunian pekerja, di area hunian pekerja yang kayak-kayak apartemen sementara itu kita letakkan mobil di sana, sehingga jika mereka ada kebutuhan formasi atau ada klaim itu kita bisa lakukan.

Dan juga karena kantor wilayah kami tidak jauh Pak di Balikpapan, sehingga kalau ada hal-hal yang sifatnya *urgent* itu bisa di *cover*. Jadi untuk IKN kita dalam waktu dekat akan membuka kantor layanan setelah gedung kita jadi Pak. Karena kita juga sudah dapat alokasi tempat untuk kantor-kantor pusat dan kantor wilayah, tapi sementara ini kita *cover* dengan mobil layanan gerak di IKN.

F-PKB (H. HANDAYANI, SKM., MPH.):

Interupsi Pimpinan, sedikit doang ya.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Handayani.

F-PKB (H. HANDAYANI, SKM., MPH.):

Kemana sih pertemuan kemarin apa benar yang, yang dari Balikpapan atau dari provinsi situ jadi bisa masuk ke IKN ya untuk apa untuk memantau kegiatan di sana. Itu terima kasih.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Sepengetahuan kami ya ada isu Pak, karena terakhir juga kami ke sana berbicara langsung dengan Otorita IKN untuk memastikan bahwa kita bisa mendapatkan tempat pada, semulanya malah kita dapat tempat Pak dapat ke ruangan kecil di kantor IKN tetapi karena sudah kepakai yang lain akhirnya kita taruh mobil aja Pak. Jadi *enggak* ada isu untuk penempatan dan yang pasti 30.000 pekerja di sana sudah semua terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan Pak.

Tadi Pak Edy sempat menanyakan JKP yang tidak *eligible* kenapa tadi salah satunya itu Pak, salah duanya malah, satu iurannya belum setahun, yang kedua dia tidak terdaftar di JKN karena salah satunya persyaratannya adalah juga JKN.

Berikutnya lagi, Bu Nurhayati makasih buat tadi masukannya. Ini ke depan kita akan perbaiki untuk pengiriman data tidak terlalu mepet tadi Ibu sampaikan *concern*-nya masukan terlalu mepet. Kita juga melihat tadi pertanyaan dari Pak Yahya apakah ketahanan dana cukup dan tadi kalau oleh

kementerian naker. Memang kami Pak menyampaikan kepada teman tenaga kerja dengan pertemuan khusus Kemenaker dengan Bu Menaker. Bahwa kami sampaikan ketahanan dana JKK khususnya JKM harus segera kita *review* regulasinya, karena iurannya tidak belum berubah sejak sebelum covid tetapi manfaatnya sudah meningkat. Manfaat JKM yang kita tahu semula klaim kematian 24 juta menjadi 42 juta, lalu santunan atau beasiswa untuk anak sekolah dari 12 juta menjadi 174 juta. Dan juga setelah covid kita juga banyak mendorong kepada sektor informal bukan prima upah dimana sektor ini punya risiko kerja lebih tinggi. Ini juga menjadi salah satu faktor menyebabkan tingginya klaim, kalau kita lihat berapa lama ketahanan dananya JKM adalah 32 bulan jadi sampai 2027, ini yang kita sampaikan.

Tentu saja beberapa usulan kami salah satunya adalah *review* iurannya atau juga kita *review* manfaatnya dengan berbagai macam, jadi ini sebenarnya bisa kita lakukan agar tidak semua sama rata. Itu yang kita sampaikan kepada Kementerian Tenagakerja selaku regulator agar sama-sama kita *concern* untuk bisa menyesuaikan manfaat atau iurannya.

Berikutnya tadi juga di, ditanyakan oleh Pak Nurhadi bagaimana SLA apakah bisa lebih cepat dari SLA yang disampaikan tadi. Betul Pak, selama ini nanti Bu Haji bisa sampaikan kalau ingin menambahkan. Klaim itu memang tidak sampai 60 hari karena rata-rata klaim berapa Bu Haji.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ROSWITA NILAKURNIA):

Baik, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ROSWITA NILAKURNIA):

Itu SLA klaim itu sebenarnya kalau berbicara SLA sesuai dengan aturan PP itu dihitung dari sejak dokumen lengkap. Jadi sekalian juga menjawab bahwa yang menjadi poin menjadi pertimbangan kami itu adalah mempercepat proses untuk masa tunggu. Jadi kebanyakan masa tunggu untuk menunggu verifikasi.

Nah kalau terkait dengan SLA klaim masa tunggu ini di JHT kemarin sempat terjadi peningkatan masa tunggu, karena memang ada sedikit perbaikan penyempurnaan pada aplikasi digital. Sehingga yang tadinya bisa klaim langsung secara otomatis dengan menggunakan biometrik jadi lari melalui *hybrid* yang Lapak Asik maupun dengan di kantor cabang. Tapi tercatat sekarang kita udah melakukan percepatan masa tunggu sudah berkurang

|

menjadi 14 hari kerja jadi yang sebelumnya sempat terjadi penumpukan pada kemarin untuk JHT.

Kemudian terkait dengan masalah SLA kematian, kita juga berusaha untuk karena syarat kematian itu kan klaim kematian itu kan harus melakukan verifikasi terhadap ahli waris dan juga sebab kematian. Jadi memang untuk sifatnya yang klaim untuk JKM itu memang memerlukan penanganan khusus untuk memastikan bahwa ahli waris yang berhak yang memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu mungkin Pak saya sampaikan, makasih.

KETUA RAPAT:

Baik, silakan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Iya baik saya lanjutkan Pak Pimpinan.

Jadi tadi terkait dengan pertanyaan apakah Ibu Dian, apakah anggarannya ada atau enggak Bu, anggaran untuk JKP masih sangat memadai karena saat ini klaim bulanan kurang lebih 35 miliar dan DJKP kita ada 14 triliun rupiah, jadi masih aman Bu InsyaAllah aman. Jadi iya Bu masih aman karena saat ini dengan posisi yang sekarang kurang lebih 35 miliar itu Bu untuk JKP per bulannya. Jadi kalau kita hitung tadi kita hitung ketahanan dananya 412 bulan ke depan gitu kira-kira kalau hitungan angka perhitungan kita.

F-NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Iya mohon maaf, tadi saya tanya selisih dari PHK sama klaim pembayaran asuransi saya minta dijawab satu. Yang kedua itu verifikasi yang seperti apa kok bisa lama banget Bu. Verifikasi yang seperti apa sih kok lama banget gitu butuh waktu lama itu apa aja verifikasinya. Kalau ahli waris kan biasanya jelas tuh kalau orang meninggal ada bukti bahwa dia meninggal kemudian ada ahli warisnya. Tapi kok verifikasinya begitu lama itu apa, apa masalahnya itu yang perlu di apa namanya dijawab ya. Supaya enggak membuat masyarakat yang harusnya bisa cepat menerima klaim jadi masih

terkatung-katung karena selalu bicara soal klarifikasi itu tadi ya. Dari zaman dahulu itu begitu juga itu kasusnya. Nah ini kan kasus klasik nih jadi jangan sampai terulang terus yang begini-begini. Makasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Tambahan dikit.

KETUA RAPAT:

Oh silakan Bang.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Yang mengenai tadi kematian Bu, jadi saya pernah dibawa oleh anggota Bapak di Siantar. Jadi dia cerita bahwa yang kematian ini yang bunuh diri pun diklaim gitu bisa diklaim gitu ya. Kemudian dia cerita bahwa dia mengadakan sosialisasi di salah satu desa dengan camatnya dengan camatnya. Di pertengahan sosialisasi ada bapak-bapak yang nanya "Bener Pak bunuh diri dapat klaim? Iya benar" ada yang nanya salah satu kan. Kemudian selesai acara pulang semuanya setelah seminggu yang bertanya tadi yang bertanya tadi bunuh diri itu bunuh diri dia, dia bunuh diri. Kemudian yang dipanggil lagi camatnya itu ke sana gitu sama orang-orang BPJS Ketenagakerjaan, Pak Camat kita jenguk orang meninggal katanya yang minggu yang lalu itu bertanya bunuh diri gitu. *Enggak* yang saya tanya di sini apa bagus gimana ini.

KETUA RAPAT:

Bunuh diri *enggak* usah dijamin.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Iya maksudnya itu saya *enggak* bisa *enggak* dijamin tapi bagus ini dijamin apa *enggak* gitu aja gitu.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, ya.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Di lapangan gitu di lapangan gitu kan.



KETUA RAPAT:

Ada kasus kayak gini Bang ya.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Ada kasus.

KETUA RAPAT:

Benar, benar, benar.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Takutnya nanti kalau BPJS Ketenagakerjaan di Amerika itu banyak yang bunuh diri itu di jembatan itu gitu.

KETUA RAPAT:

Bisa jadi.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Kalau di kita mungkin masih jarang.

KETUA RAPAT:

Gara-gara, gara-gara judi online ini bisa ada banyak bunuh diri nih, iya, iya.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Oh iya, saya cuman mau nanya itu aja Pak, Pak Dirut istilahnya bagusnya itu diklaim apa *enggak* gitu.

Makasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak.

Ini konkret benar nih, silakan-silakan di respon.



DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Baik, Bu Irma terima kasih Bu tadi sempat kita respon juga terkait dengan selisih. Jadi memang Bu kalau kita lihat selisihnya yang dari tahun ke tahun makin mengecil itu selisihnya itu disebabkan yang pertama adalah tiga penyebab besar:

1. Iurannya belum lengkap 12 bulan. Jadi kalau di tahun-tahun pertama bisa jadi belum banyak perusahaan yang disiplin untuk mengiurkan pesertanya. Jadi tahun pertama selisihnya masih 10.000 tahun kedua 10.000 tahun ketiga tinggal 2.000.
2. Memang tidak *eligible* JKP karena ternyata peserta tersebut enggak terdaftar di JKN-nya kesehatan. Sehingga lagi-lagi ini jadi edukasi juga kepada perusahaan untuk memastikan mereka juga terlindungi di BPJS Kesehatan.

Jadi dua hal itu yang kita lihat jadi penyebab tidak bisa klaim. Lalu juga masih ada yang terlambat mengajukan setelah 3 bulan karena kan aturannya setelah di PHK 3 bulan dia melakukan klaim. Nah ini juga kita pastikan bersama teman-teman di cabang biasanya kalau perusahaan-perusahaan tersebut dia sudah memberikan *flagging* nonaktif kan perusahaan ada aplikasinya Bu ya ada SIPP.

Nonaktif itu biasanya teman cabang akhirnya proaktif ini. Nonaktif ini apakah berarti dia PHK kalau memang dia PHK jangan lupa urus JKP-nya jangan lupa untuk pastikan iurannya sudah 12 bulan. Jadi di awal-awal kita juga belajar tuh Bu, oh kok ternyata banyak juga ya yang ternyata belum 12 bulan, oh ternyata banyak juga enggak JKN. Jadi waktu kita edukasi ke perusahaan itu pastikan mereka ikut JKN dan pastikan mereka sudah 12 bulan jadi jangan sampai *enggak*.

Nah ini jadi kalau lihat dari trennya Bu Irma memang semakin kemari semakin membaik. Karena tadinya hampir separuh yang tidak *eligible* sekarang dari 27.000 yang enggak *eligible* tinggal 10%-nya tinggal 2000-an. Nah ini memang pelajaran buat kita Bu. Jadi kita terus dorong kepada perusahaan wasnaker dan cabang kami juga mesti lihatin betul aplikasi perusahaan yang mulai NA, berarti ini apa, apakah benar karena PHK atau memang kontraknya berakhir, kalau kontraknya berakhir berarti enggak, kalau yang PHK berarti harus cepat urus JKP-nya.

Itu Bu jadi kira-kira.

Bu Haji silakan tadi menambahkan pertanyaan Bu Irma.

DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ROSWITA NILAKURNIA):

Jadi yang dimaksud verifikasi karena kalau JHT itu kan memang yang bersangkutan uangnya. Jadi kita memverifikasi itu adalah tentang karena ada terdiri kadang-kadang ada beberapa kartu jadi kita memverifikasi pekerjaan dan sebagainya sesuai dengan terdaftar kita untuk memastikan. Tapi itu kenapa terjadi penumpukan untuk hal tersebut, jadi sebenarnya kalau Lapak Asik itu tanpa harus hadir di kantor cabang sehingga lakukan wawancara secara virtual. Tapi kalau cabang kan otomatis secara itu langsung verifikasi langsung di lapangan dengan pertanyaan-pertanyaan standar seperti kayak di bank.

Sementara kalau misalkan terjadi kematian itu kan yang mengklaim itu kan ada ahli waris. Ahli waris apakah istri atau suami atau anak dan sebagainya kita tentu mencocokkan dengan data dukcapil dan kebenaran bahwa yang bersangkutan itu benar adalah ahli waris.

Kemudian juga kalau kematian, bisa jadi terjadi kematian itu apakah benar kematian murni atau karena kecelakaan yang mengakibatkan kematian tentunya ini adalah santunan yang berbeda. Jadi sebenarnya bukan verifikasi untuk mempermudah tapi untuk menyesuaikan bukan mempersulit tapi untuk menyesuaikan hak manfaat yang diterima dengan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Jadi itu Bu yang kita lakukan verifikasi untuk kebenaran. Karena yang terdaftar peserta penerima ahli waris, tentunya kita harus melakukan verifikasi tentang kebenaran ahli waris tersebut. Demikian Pak.

F-NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Iya saya paham Bu, tapi kan waktu dia mendaftar kan dia sudah tahu dia bekerja ya kan. Kalau dia mati karena kecelakaan pasti dia juga sudah informasikan kan kalau dia mati meninggal karena meninggal karena kecelakaan kerja misalkan itu kan. Menurut saya itu enggak terlalu repot juga *sih* informasi itu bisa didapat gitu. Nah saya cuma ingin mengingatkan jangan sampai hal-hal yang Ibu sampaikan bahwa verifikasi itu tadi itu menghambat mereka untuk bisa mendapat klaim, itu aja, ya Bu.

Makasih Bu.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):

Mungkin ada tambahan respon Pak.



DIREKTUR PELAYANAN BPJS KETENAGAKERJAAN (ROSWITA NILAKURNIA):

Jadi sebenarnya Bu, kan pada saat penyampaian dokumen belum tentunya semuanya lengkap Bu. Jadi artinya tentang ahli warisnya siapa data keluarga dan sebagainya yang menerimanya. Tapi setelah dinyatakan lengkap kan SLA kami itu adalah setelah dinyatakan lengkap itu segera dibayarkan. Jadi selama ini kita mencapai SLA sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi yang kita lakukan adalah proses dalam hal memverifikasi tersebut Bu itu.

F-NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Iya saya paham tapi kan saya sudah tadi bilang ya jangan sampai verifikasi ini yang dilakukan ini menghambat. Jadi Ibu terima aja itu *omongan* kemudian Ibu perbaiki, kalau Ibu bantah-bantah begini panjang lagi nih nanti saya ngomong, mau saya panjangin *nih*? mau saya tanya lagi yang lain? kan enggak *toh*. Saya tanya satu hal saya nyampaikan satu hal perbaiki verifikasinya karena saya lihat tadi kan klaim, klaim, klaim ini kan banyak menumpuk kan itu persoalannya.

KETUA RAPAT:

Dipercepat begitu ya prosesnya Bu ya.

F-NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Iya maksud saya dipercepat itu aja jadi *enggak* usah ngomong ini itu ini itu lagi sudah Ibu sampaikan semua tadi di depan. Tapi menurut saya itu masih kelamaan. Nah tolong dipercepat itu aja sudah. Kan ada perbaikan sih sebenarnya tadi Pak Dirut bilang kan kita paham itu tapi kalau bisa dipercepat verifikasinya itu dipercepat. Saya tahu ada permasalahan-permasalahan saya paham, nah tapi kan ini kan masyarakat mintanya dipercepat gitu loh. Satu.

Yang kedua kan jelas tadi dewasa ngomong ya sudah disampaikan di dokumen, bahwa banyak sekali kan klaim masih banyak sekali klaim masih belum bisa diselesaikan nah karena itu kita bicara tolong selesaikan secepat-cepatnya. Apalagi dalam posisi hari ini PHK yang banyak yang makin berjibun ini, ini kan pemerintah dicaci-maki nih ya. Padahal ekonomi global ini kan *enggak* salah pemerintah juga *enggak* bisa kita salahkan pemerintah juga *enggak* bisa kita salahkan juga BPJS Tenagakerja dalam, dalam situasi seperti ini gitu loh. Tapi *impact* yang didapat dari proses PHK itu Pak, nah itu yang harus kita kerjakan semaksimal mungkin sehingga mereka mendapatkan haknya dengan cepat gitu loh. Jadi udah jatuh *enggak ketimpa* tangga Bu bisa ada ya *effort* ya ada yang bisa digantungkan gitu loh, nah itu yang ingin kami di Komisi IX ini pastikan.

Itu saja terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jadi itu masukan Pak, jadi masukan saya pikir harus menjadi perhatian. Bagaimana posisinya adalah proses-proses itu jangan sampai mengganggu juga dengan pekerja karena pekerja ini butuh segera kepastian agar tidak, tidak apa prosesnya tidak lama jadi bagaimana BPJS punya PR untuk mempercepat proses klaim-klaim itu tadi yang sampaikan Bu, Bu Irma begitu. Jadi masukkan itu.

Silakan Pak Dirut.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Baik, terima kasih Ibu Pimpinan.

Bu Irma terima kasih Bu kita akan perbaiki terus proses verifikasinya karena *spirit* kita juga sama Bu, supaya peserta bisa dapat manfaat cepat paling tidak bisa sedikit ada inilah pelampung selama dia *enggak* bekerja.

Yang terakhir mungkin tadi yang dari Ibu Nini sampaikan betul Bu kita butuh dukungan untuk koordinasi dengan kementerian lembaga, Kementerian Luar Negeri juga. Karena tadi untuk menjangkau PMI kita memang butuh ada *desk* sajalah paling tidak hanya *desk* cukup di, di kantor perwakilan kita agar kita bisa berkomunikasi mereka dan *enggak* semua negara.

Dalam waktu dekat juga saya dengar dari Pak Jay, Bu Menteri Tenaga Kerja juga akan mengumpulkan semua Adnaker. Karena Adnaker jadi posisi kunci juga karena sudah ada di masing-masing negara tetapi tidak semuanya punya pemahaman yang sama, tidak semuanya punya *effort* yang sama. Jadi kelihatannya Bu Menteri Tenaga Kerja ingin mengumpulkan dan menyamakan derapnya, karena kalau Adnakernya semua aktif rasanya itu sangat membantu juga bagi para pekerja kita.

Jadi kami butuh dukungan juga dari Komisi IX untuk kita bisa punya kemudahan-kemudahan dari kementerian-kementerian yang lain. Termasuk juga yang akan diterbit oleh Pak Menko Ekonomi bagaimana kita bisa koordinasi dengan semua kementerian lembaga. Karena banyak PMI yang sudah jadi peserta pulang ke Indonesia berangkat lagi itu sebenarnya potensi untuk kita garap juga Bu. Selama ini berangkatnya di pintu-pintunya *enggak* selamanya dari pelabuhan udara soalnya.

saya rasa itu Bu Pimpinan beberapa hal yang dapat kami respon. Tentu saja semua masukan harapan dari Bapak Ibu semua menjadi perbaikan buat kami Bu, karena memang PR-nya masih banyak. Peserta di luar juga harapannya tinggi kepada kami. Tentu saja pencapaian kami sampai saat ini tidak terlepas di dukungan Bapak Ibu semua di Komisi IX.

Sosialisasi-sosialisasi daerah itu membantu kami juga membuat mereka lebih *aware* dan juga pemerintah daerah juga lebih lebih patuh. Karena kerja sama juga semakin baik kalau Bapak Ibu turun biasanya mereka juga lebih disiplin gitu jadi terima kasih dukungannya. Kita sama-sama ingin memastikan seluruh pekerja bisa terlindungi.

Demikian Ibu Pimpinan, saya kembalikan kepada Pimpinan.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):

Terima kasih Pak Dirut.

Selanjutnya dari.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Pimpinan, tadi sedikit belum direspon yang bunuh diri.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):

Apa perlu apa tidak bagusnya gitu.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih.

Silakan Pak Dirut direspon.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Iya, baik Pak.

Memang menarik itu, sebenarnya karena kita secara regulasi kita tidak mempermasalahkan penyebab kematiannya, sehingga akhirnya begitu orang



bunuh diri ya berarti bisa di *cover*. Memang menjadi menjadi dilematis pada saat di forum-forum diskusi begitu pada saat ada pertanyaan-pertanyaan yang kritis begitu memang sebenarnya secara regulasi boleh. Jadi kalau kita jawab bunuh diri enggak boleh kan *enggak* tepat juga, tetapi pada saat terjawab boleh dan ada *access* seperti itu ya memang enggak mudah.

Tapi kalau kita lihat apakah regulasinya perlu di *review* mungkin perlu-perlu kajian Pak karena selama ini kan JKM ini tidak melihat sebab kematiannya. Itu juga jadi, jadi ruang yang leluasa bagi para pekerja gitu Pak. Tapi takutnya nanti kalau diatur malah jadi takutnya malah jadi sulit. Mungkin agak ada *access* ke, ke kata-kata Bu Nini. Tapi kalau kita lihat sih memang kecil sekali ya, kecil sekali sih Pak yang, yang akhirnya dapat.

KETUA RAPAT:

Tapi jadi kajian itu Pak.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Iya Bu.

KETUA RAPAT:

Sebelum saya berikan ke dewas, ini saya juga mendapatkan masukan dan ini sering sekali saya diskusikan dengan teman-teman direksi soal apa kelompok-kelompok yang sudah tidak punya ahli waris dan mereka, mereka bergabungnya dengan yayasan.

Waktu itu kita diskusi bagaimana kalau ahli warisnya ke yayasan. Cuma secara hukumnya kan kesulitan kalau, kalau penerima ahli waris gampang tapi kalau ternyata orang yang meninggal itu punya hutang dan sebagainya ini nantinya akan ber apa membebani juga kepada yayasan tersebut.

Nah ini perlu dikajiannya seperti apa saya juga sudah diskusi dengan Kementerian Ketenagakerjaan agar nantinya juga tidak, tidak mengurangi hak mereka kalau seperti ini kan hak mereka tidak bisa terbayarkan. Nah ini kalau ada kajiannya mungkin bisa disertakan juga Pak Dirut untuk ke, ke kita karena mereka juga mengajukan RDP sepertinya, RDPU dengan kita kelompok-kelompok tersebut.

Gitu ya pak Dirut ya.

Selanjutnya dari Dewas silakan.

KETUA DEWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI BAHRI):

Ya baik, terima kasih Pimpinan.

Yang pertama tentu kami dari Dewan Pengawas mengapresiasi dan berterima kasih atas semua *statement* dan pertanyaan yang disampaikan ke terutama kepada Dewan Pengawas. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian di Komisi IX saya kira punya *spirit* yang sama untuk memajukan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Sama dengan yang kami lakukan di Dewan Pengawas, di prolog tadi sudah kami sampaikan bahwa fokus utama kepengawasan yang terkait dengan kepesertaan dan keberlanjutan saya kira ini menjadi fokus utama yang menjadi *concern* dari Dewan Pengawas. Oleh karena itu, Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, upaya-upaya yang sudah dilakukan direksi saya kira tidak terlepas dari bagaimana Dewan Pengawas memberikan masukan dan dukungan terutama dari aspek kepesertaan.

Terima kasih Bu, Bu Irma tadi sudah menyampaikan bagaimana kita harus menguatkan lagi pengawasan ini. Karena kalau kita lihat target kepesertaan sampai 2026 itu ditarget 70 juta. Saya kira masih panjang perjalanannya masih upaya-upaya yang harus dilakukan oleh manajemen untuk bisa sampai kepada target sampai ke 70 juta itu. Oleh karena itu, ada tiga hal yang sudah kami sampaikan kepada direksi, terkait bagaimana kita memperluas kepesertaan, lalu bagaimana keberlanjutan dari kepesertaan itu bisa dijaga.

Yang pertama kita sudah mengupayakan agar direksi dan manajemen melakukan perbaikan sistem keagenan serta mengefektifkan implementasi dari sistem keagenan tersebut. Maka dengan keluarnya Perban Nomor 1 Tahun 2024, saya kira ini sudah menunjukkan apa namanya itikad dan upaya-upaya yang lebih, lebih terukur untuk bisa menata kembali agar sistem keagenan itu lebih produktif.

Apalagi kita punya tantangan Bapak Ibu sekalian, di BPJS ini terkait dengan target BPU. Target BPU kita ini kita punya potensi sekitar 45 juta, sementara apa namanya capaian yang sampai tahun 2024 itu 9 juta jadi sekitar 20% dari potensi yang sudah ada. Sehingga kalau misalnya sistem keagenan ini bisa lebih efektifkan lagi, barangkali ini bisa membantu untuk capaian-capaian terkait dengan kepesertaan khususnya target BPU.

Yang kedua itu kita apa mendorong agar penajaman dan efektivitas implementasi strategi serta evaluasi dalam rangka peningkatan pencapaian kepesertaan aktif untuk mendukung keberlangsungan atau *sustainability* peserta dan program jaminan sosial ketenagakerjaan, saya kira ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bukan hanya kepesertaan tapi bagaimana



keberlanjutan program itu menjadi fokus kepengawasan yang, yang sudah menjadi *concern* kami.

Yang ketiga itu terkait dengan penguatan dan perluasan kerja sama dengan stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. *Nyambung* dengan yang disampaikan Pak Yahya tadi, seperti yang sudah kita diskusikan di Kalimantan Timur kemarin terkait dengan bagaimana kita bisa mengefektifkan Inpres 2 Tahun 2021 terkait dengan Perluasan Optimalisasi Perluasan Kepesertaan, maka saya kira di tingkat pusat dan tingkat daerah kita memang perlu dukungan-dukungan yang, yang cukup signifikan.

Saya kemarin menyampaikan minimal ada tiga dukungan yang dibutuhkan:

1. Yang pertama yang terkait dengan bagaimana kita mendapatkan ketersediaan data yang, yang valid terkait dengan pekerja. Terutama yang terkait dengan pekerja-pekerja miskin dan rentan, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Yang kedua terkait dukungan regulasi. Terutama yang terkait di daerah saya kira dukungan regulasi itu menjadi salah satu poin penting untuk bisa memastikan apakah pemerintah daerah itu punya komitmen yang bisa diwujudkan, terutama bagaimana pemerintah daerah itu bisa memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja miskin atau rentan;
3. Yang ketiga terkait dengan dukungan anggaran;
4. Yang keempat terkait dengan dukungan politis. Saya kira ini menjadi satu hal yang penting agar pemerintah daerah itu juga menjadi mengambil bagian untuk bisa meyakinkan kepada setiap pekerja untuk bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan.

Kami sangat sepakat dengan yang disampaikan dengan Bu, Bu Nurhayati bahwa setiap pekerja itu mestinya harus terlindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Semakin banyak pekerja yang terlindungi saya kira semakin ideal dan semakin bagus apa namanya perkembangan dan kemajuan jaminan sosial ketenagakerjaan ini untuk bisa memastikan semua pekerja itu bisa terlindungi.

Nah yang terkait dengan Bu Nurhayati juga, terima kasih Bu atas masukannya. Kedepan memang kalau apa namanya 3 hari sebelum rapat kita akan menyampaikan materi-materi kepada DPR, cuman perlu kami sampaikan dewan sudah menyampaikan tanggal 1 jam 10 Bu sudah kita sampaikan ke sekretariat. Dan kalau memang ini dirasa perlu untuk apa namanya, saya kira ke depan memang kalau kesepakatannya 3 hari sebelum rapat saya kira saya, saya sangat sepakat dan akan mendukung apa yang apa yang menjadi kesepakatan itu.

Terus yang ketiga tadi yang terkait dengan JKP perbedaan antara klaim JKP dengan jumlah PHK tadi disampaikan oleh Pak Anggoro, tapi di sini saya

sedikit memberikan tambahan yang terkait dengan bagaimana, misalnya apa namanya tiga hal tadi yang disampaikan itu menjadi poin penting, kenapa antara angka, angka klaim JKP dan JHT ini memang tidak sinkron.

Yang pertama, ternyata banyak juga dari peserta-peserta kita yang tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan itu ikut dan dapatkan apa namanya program JKP. Sehingga mereka itu tidak menyadari apa namanya bisa untuk bisa mengklaim kaitan dengan JKP, selain yang tiga tadi yang eligibilitas dan lain sebagainya itu saya kira itu menjadi penting untuk bisa disampaikan.

Mungkin Pimpinan yang bisa disampaikan atau dari rekan-rekan dan pengawas ada yang ingin menambahkan? Pak Adit? Aba?

KETUA RAPAT:

Saya pikir cukup ya karena kita masih mau ada rapat lagi jadi kita langsung masuk kesimpulan.

KETUA DEWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI BAHRI):

Baik, itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih dari Dewas BPJS Kesehatan dan dari Direksi tadi sudah menyampaikan catatan. Nanti yang belum detail bisa nanti di jawaban apa tertulis ya untuk direspon untuk semua pertanyaan karena kita faktor waktu aja karena habis ini ada rapat lanjutan lagi.

Kita langsung masuk ke kesimpulan. Rapat Dengar Pendapat dengan Dewas dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan Selasa, 2 Juli 2024:

1. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam hal:
 - a. Perlindungan pekerja/buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor;
 - b. Penyelesaian klaim jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta yang masih terkendala masalah administrasi dan manajemen;
 - c. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri;
 - d. Koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam perlindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Untuk poin satu silakan direspon. Disetujui? Oke kalau tidak ada catatan ya.



(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan melakukan terobosan sosialisasi di berbagai daerah.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IX DPR RI mendesak Dewas, *sorry*, mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kepastian:
 - a. Implementasi hasil pengawasan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memperoleh Jaminan Kehilangan Pekerjaan JKP berdasarkan kepesertaannya.

Poin ketiga, setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada RDP hari ini selambat-lambatnya tanggal 9 Juli 2024.

Setuju? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Saya persilakan sekarang kepada mitra kami, mitra kita bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan merespon dahulu baru kemudian oleh Ketua Dewas.

Silakan Pak Anggoro.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Kami setuju Bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih. Dari Dewas.

KETUA DEWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI BAHRI):

Kami setuju.



KETUA RAPAT:

Oke.

KETUA DEWAS BPJS KETENAGAKERJAAN (MUHAMMAD ZUHRI BAHRI):

Terutama di poin dua setuju juga.

KETUA RAPAT:

Baik.

Dengan demikian kita sudah mendapatkan kesimpulan rapat untuk kita setuju bersama disepakati ya.

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian kesimpulan rapat sudah disetujui dan terima kasih atas Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang sudah hadir.

**Bapak, Ibu Pimpinan,
Bapak Ibu Dirut dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, dan
Ketua Dewas, dan Para anggota.**

Untuk itu sebelum ditutup, kami minta kata penutup dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA BPJS KETENAGAKERJAAN (ANGGORO EKO CAHYO):

Baik,

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi IX.

Terima kasih juga untuk masukan, harapan, dan tantangan tadi. Kami butuh dukungan dari Bapak Ibu semua karena memang ini sudah tugas kami semoga apa tadi yang disampaikan menjadi masukan buat kami. Kita akan menyiapkan jawaban tertulis untuk melengkapi hal-hal yang memang harus kita perbaiki.

Demikian dari saya, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu



KETUA RAPAT:

Walaikumsalam

Sebelum kita tutup agar semua yang kita bahas dan kita putuskan ini diberkati Tuhan kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing.

Berdoa dipersilakan.

(RAPAT: BERDOA)

Berdoa selesai.

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, Puji Tuhan rapat saya tutup.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabakaratu

Shalom,

Salve,

Om shanti shanti om,

Namo buddhaya,

Salam sehat bagi kita semua.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.07 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A
NIP. 197604011998032002**